



2015

LAPORAN KINERJA



**BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
FEBRUARI, 2016**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat tersusun ***Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015.***

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua program kerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2015.

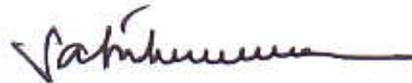
Ucapan terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga selesainya penyusunan laporan ini.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan capaian kinerja pada tahun yang akan datang.

Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami berharap masukan ataupun saran yang bersifat membangun dari semua pihak khususnya jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan guna lebih menyempurnakan Laporan Kinerja Instansi (LAKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Jakarta, Februari 2016

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN**



WAHJU SATRIO UTOMO, SH, M.Si

Pembina Utama (IV/e)

NIP. 19590906 198503 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

(Executive Summary)

Dalam rangka mewujudkan visi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia Perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *zero accident*, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan berusaha mewujudkan tujuannya, yaitu mencetak tenaga ahli maupun terampil yang siap pakai demi memenuhi standar kompetensi, baik dalam bidang aparatur negara maupun dalam hal penyediaan operator sarana dan prasarana transportasi; maupun sasaran utamanya, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan melalui pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perhubungan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menuangkannya dalam Rencana Strategis. Sasaran strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada tahun 2015 ada 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang dilengkapi dengan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Sasaran Startegis yang telah ditetapkan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah tercapai tingkat keberhasilan yang baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat capaian yang berhasil mencapai 100% atau lebih terdapat 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan rata-rata tingkat pencapaian sebesar 112,05%, walaupun sudah cukup baik capaiannya tapi masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis yang telah mencapai atau melebihi target adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima
 - Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan sebesar 158,21%;
2. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika
 - Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan sebesar 159,64%;
3. Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition Serta Public Private Partnership*
 - Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasisebesar 276,32%;
4. Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional
 - Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan sebesar 233,33%;
5. Terwujudnya Kurikulum dn Silabi yang berbasis kompetensi Transportasi (Harmozation, Compliance and Demand Fullfilment Curriculum) dan sesuai dengan perkembangan IPTEK.

Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat,Laut,Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi sebesar 105,06% jumlah modul/bahan ajar standar kompetensi yang tidak tercapai yaitu untuk Diklat Transportasi Darat 1

dokumen dan modul/bahan ajar Standar Kompetensi untuk diklat Transportasi Laut 6 dokumen.

6. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir yang memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.

Jumlah Sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapuan dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir sebesar 131,72%.

Namun ada sasaran strategis yang tingkat capaian kinerjanya di bawah target, yaitu:

1. Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi

- Jumlah sistem informasi yang dibangun sebesar 33,73 %
Karena ada Sistem Informasi Keuangan pada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang tidak terlaksana.

2. Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel yang diarahkan untuk menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapuan yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 58,33 %;

Dari usulan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sebanyak 16 Satker namun yang disetujui oleh Kementerian Keuangan baru 7 (tujuh) Satker menjadi Badan Layanan Umum sedangkan untuk 9 (sembilan) satker lainnya saat ini masih menunggu proses persetujuan dari Kementerian Keuangan.

3. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan
 - Realisasi Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan sebesar 83 %, atau hanya tercapai 93,21 % dari yang ditargetkan sebesar 89,25 %;
4. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika
 - Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika sebesar 72,46 %.

Secara keseluruhan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan pada tahun 2015 mencapai tingkat keberhasilan yang sangat baik. Dari 10 (sepuluh) sasaran strategis, 6 (enam) sasaran strategis telah dicapai 100% atau lebih, sedangkan 4 (empat) sasaran strategis lainnya meskipun belum mencapai target tetapi sudah cukup baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
A. LATAR BELAKANG	I - 1
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	I - 2
1. Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan	I - 6
2. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	I - 7
3. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	I - 8
4. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	I - 9
5. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	I - 10
C. VISI DAN MISI PRESIDEN	I - 14
D. AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)	I - 14
E. SASARAN	I - 15
F. SUMBER DAYA MANUSIA.....	I - 16
G. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	I - 17
H. SISTEMATIKA LAPORAN	I - 22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
BADAN PENGEMBANGAN SDM (PERHUBUNGAN)	II - 1
A. RENCANA KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	II - 1
1. Target Kinerja	II - 1
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015.....	II - 8
B. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2015	II - 10

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BADAN PENGEMBANGAN	
SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2015	III - 1
A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN	
SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2015	III - 1
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015	III - 1
2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011 – 2015	III - 9
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)	III - 26
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)	III - 29
5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	III - 66
6. Kontribusi Terhadap Capaian IKU Kementerian Perhubungan	III - 75
B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN	
SDM PERHUBUNGAN	III - 77
BAB IV P E N U T U P	IV - 1
A. KESIMPULAN	IV - 1
B. SARAN	IV - 1

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Form Rencana Strategis Tahun 2011 - 2015
- Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
- Form Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015
- Form Pengukuran Kinerja Tahun 2015
- Form Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menciptakan kinerja Kementerian Perhubungan yang berdaya guna, berhasil guna serta berstandar internasional, maka Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui pembinaan SDM sektor perhubungan mempunyai tugas utama melaksanakan berbagai macam program pendidikan, pelatihan dan pengembangan, guna mempersiapkan dan meningkatkan SDM perhubungan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional perhubungan.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam arti bahwa penggunaan semua sumber daya yang ada harus dapat menghasilkan *output* yang dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap kinerja Kementerian Perhubungan.

Berbagai program kerja dan kegiatan dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi melalui pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pengembangan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan berikut jajarannya yang mana harus dapat berjalan secara efektif, efisien, sesuai dengan rencana, standar dan semua ketentuan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

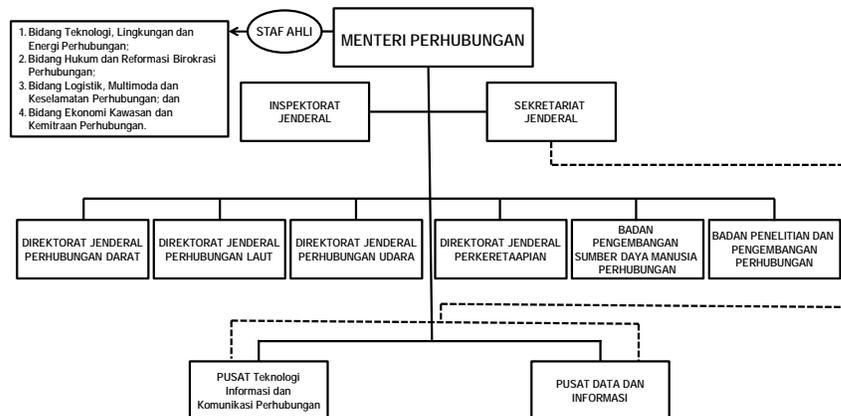
sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan selama tahun 2015 dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015. Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2015.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2015 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka memenuhi visi dan Misi yang telah ditetapkan. Visi dan Misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015 - 2019.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, pasal 339 menunjukkan bahwa nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.



Gambar 1.1
Susunan Organisasi Kementerian Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor: PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, dalam pasal 780 menyatakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dipimpin oleh Kepala Badan.

Dalam rangka memenuhi ketersediaan SDM Transportasi yang handal, profesional dan berkualitas tersebut diperlukan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan yang terarah, sesuai dengan karakteristik operasional yang dibutuhkan. Untuk itu perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan di bidang perhubungan harus diprioritaskan sesuai amanat dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2007 sebagaimana dirubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 tahun 2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi.

Perubahan nomenklatur Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan menjadi Badan Pengembangan SDM Perhubungan di latar belakang oleh adanya 5 (lima) hal yaitu:

1. Adanya 4 (empat) UU Transportasi :
 - a. pemerintah bertanggung jawab terhadap penyediaan dan pengembangan SDM Perhubungan secara merata;
 - b. setiap SDM Perhubungan wajib memiliki kompetensi;
 - c. pendidikan dan pelatihan SDM Perhubungan menjadi tanggung jawab pemerintah dengan melibatkan masyarakat (penyedia dan pengguna jasa);
 - d. dikenakan sanksi pidana penjara bagi mereka yang tidak memiliki kompetensi;
2. Kondisi transportasi nasional;
3. SDM Transportasi (SDM Aparatur, SDM Non Aparatur dan Masyarakat sebagai pengguna dan Penyedia Jasa Transportasi);
4. Komunikasi dan Kordinasi:
 - a. komunikasi dan koordinasi antar sektor belum berjalan baik;
 - b. komunikasi dan koordinasi Kementerian Perhubungan dengan Dinas Perhubungan Propinsi dan Kabupaten/Kota belum berjalan dengan baik;
 - c. komunikasi dengan masyarakat penyedia dan pengguna jasa transportasi belum berjalan dengan efektif.
5. Pendidikan dan pelatihan Transportasi:
 - a. sumber daya yang dimiliki pemerintah dan swasta masih terbatas (sarpras, tenaga pendidik dan anggaran);
 - b. diklat transportasi dan penunjang untuk masyarakat belum merata keseluruh wilayah;
 - c. diklat transportasi dan penunjang untuk aparatur masih sangat terbatas;
 - d. kursil dan metode diklat belum sepenuhnya sesuai dengan pemenuhan kompetensi (*knowledge, skill, and attitude*).

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- b. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam mengoptimalkan fungsi tersebut diatas, Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai 3 (tiga) unsur utama yaitu :

1. Pendidikan :
 - a. Pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. Tenaga kependidikan;
 - c. Kurikulum dan silabus;
 - d. Metode diklat;
 - e. Kerjasama pendidikan dengan universitas/institut di dalam negeri dan luar negeri;
 - f. Bantuan pengembangan pendidikan milik swasta/masyarakat.
2. Pelatihan :
 - a. Sarana dan prasarana pelatihan;
 - b. Tenaga/Instruktur pelatih;
 - c. Materi/bahan pelatihan;
 - d. Metode pelatihan;
 - e. Penyebaran lokasi pelatihan;
 - f. Kerjasama penyelenggaraan pelatihan dengan pemerintah daerah (PEMDA) dan asosiasi-asosiasi penyedia jasa dan profesi transportasi.

3. Penyuluhan :

- a. Materi/bahan penyuluhan;
- b. Tenaga penyuluh;
- c. Metode penyuluhan;
- d. Penyebaran lokasi penyuluhan;
- e. Kerjasama penyuluhan dengan pemerintah daerah dan assosiasi serta organisasi masyarakat.

Yang mana ketiga unsur tersebut di dalam pelaksanaannya harus didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang handal dan terintegrasi yaitu dengan dibentuknya Unit Informasi Teknologi (IT) BPSDM Perhubungan.

Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, adapun susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Darat;
- c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;
- d. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara; dan
- e. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

1. **Sekretariat Badan**

Sekretariat Badan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 784, Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja anggaran, perumusan kinerja, pengelolaan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi, serta pelaporan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengelolaan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
- c. Penyiapan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan akuntansi keuangan dan barang milik Negara serta pengelolaan tindak lanjut hasil temuan di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan; dan
- d. Penyiapan urusan tata usaha, kerumahtanggaan, keprotokolan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum dan penyusunan pertimbangan hukum, kerja sama, pengelolaan teknologi informasi, pelaksanaan kehumasan, penyuluhan dan sosialisai, serta pelayanan informasi public di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;

2. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 803, **Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat** mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi darat dan perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut **Pengembangan SDM Perhubungan Darat** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi darat dan perkeretaapian;
- b. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi darat dan perkeretaapian; dan
- c. Penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan darat.

3. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 803 pasal 818, **Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut** mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi laut.

Adanya penambahan 2 UPT baru yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman dan Minahasa Selatan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 124 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran.

Dalam melaksanakan tugas tersebut **Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi laut;
- b. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi laut; dan
- c. Penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hukum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut;

4. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 834, **Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara** mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan udara.

Adanya perubahan nomenklatur Loka Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi berubah menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 123

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang Banyuwangi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut **Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pendidikan, pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan transportasi udara;
- b. Penyiapan rencana, program dan anggaran pendidikan, kerja sama, rencana kebutuhan SDM, standarisasi dan akreditasi, pembinaan lembaga pelatihan, pembinaan tenaga pendidik dan kepelatihan, sertifikasi, pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan transportasi udara; dan
- c. Penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran, kepegawaian, hokum, kehumasan, pelayanan informasi publik, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pengelolaan data dan informasi, analisis, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara;

5. Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan

Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Sesuai dengan PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan pasal 849, **Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan** mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen untuk sumber daya manusia aparaturnya.

Adanya penambahan UPT baru yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi sesuai dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor: PM 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut **Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan** menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan jenis pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan, rencana program dan anggaran, standardisasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur perhubungan;
- b. Penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural dan fungsional aparatur perhubungan;
- c. Penyiapan standardisasi, penjaminan mutu dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pembinaan lembaga pendidikan dan pelatihan, pembinaan widyaiswara, instruktur, dan tenaga manajemen serta sertifikasi pendidikan manajerial aparatur perhubungan; dan
- d. Penyiapan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, hokum, kehumasan, pelayanan informasi public, layanan kesehatan, keuangan, Barang Milik Negara (BMN), perpustakaan, pelaporan kinerja serta pengelolaan data dan informasi serta analisa dan pemenuhan kebutuhan pengembangan perangkat teknologi informasi di lingkungan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan.

Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Adapun pembinaannya, dalam aspek teknis administratif dilimpahkan kepada Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Kemudian pembinaan

dan bimbingan dalam aspek teknis operasional pendidikan dan pelatihan dilimpahkan kepada Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan masing-masing.

Adapun Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan adalah :

- 1) Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) di Bekasi;
- 2) Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) di Jakarta;
- 3) Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) di Curug;
- 4) Balai Besar Pendidikan, Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) di Jakarta;
- 5) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang;
- 6) Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar;
- 7) Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya
- 8) Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal;
- 9) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan;
- 10) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya;
- 11) Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar;
- 12) Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun;
- 13) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Palembang;
- 14) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Bali;
- 15) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang;
- 16) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong;
- 17) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong;
- 18) Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh-Besar;
- 19) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman;
- 20) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan;
- 21) Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta;
- 22) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang;
- 23) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura;
- 24) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug;

- 25) Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi; dan
- 26) Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter (BP3K) SDM Transportasi.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 60 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2
Susunan Organisasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Tahun 2015 Satker/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah bertambah 3 (tiga), yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Minahasa Selatan dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dan mulai beroperasi tahun 2016.

C. VISI DAN MISI PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menetapkan Visi dan Misi pembangunan Tahun 2015-2019 yang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Adapun visi pembangunan Tahun 2015-2019 adalah : **“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Sedangkan upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

D. AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)

Agenda prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk menunjukkan prioritas program pembangunan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Adapun kesembilan agenda prioritas pembangunan yaitu:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara;

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

E. SASARAN

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas pokok dan fungsi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

1. **Handal** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
2. **Berdaya Saing** diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau dan kompetitif yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri dan produktif;
3. **Nilai Tambah** diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security dan sovereignty*) di segala bidang (ideologi,

politik, ekonomi, lingkungan, social, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015 dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 2.878 orang. Berikut rincian komposisi pegawai menurut satuan kerja:

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan	112
2	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat	82
3	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut	42
4	Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara	74
5	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	89
6	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi	173
7	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug	376
8	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta	241
9	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta	98
10	Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	201
11	Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar	122
12	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya	110
13	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal	95
14	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan	96
15	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya	123
16	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar	97
17	Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun	37
18	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi darat (BP2TD) Palembang	71
19	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi darat (BP2TD) Bali	70
20	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang	106

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
21	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong	96
22	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	31
23	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar	37
24	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Padang Pariaman	29
25	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Minahasa Selatan	27
26	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta	47
27	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi	39
28	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	47
29	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	41
30	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug	40
31	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Karakter (BP3K) SDM Transportasi	29
JUMLAH		2.878

Sumber Data: Satker/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan

G. ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

1. Permasalahan

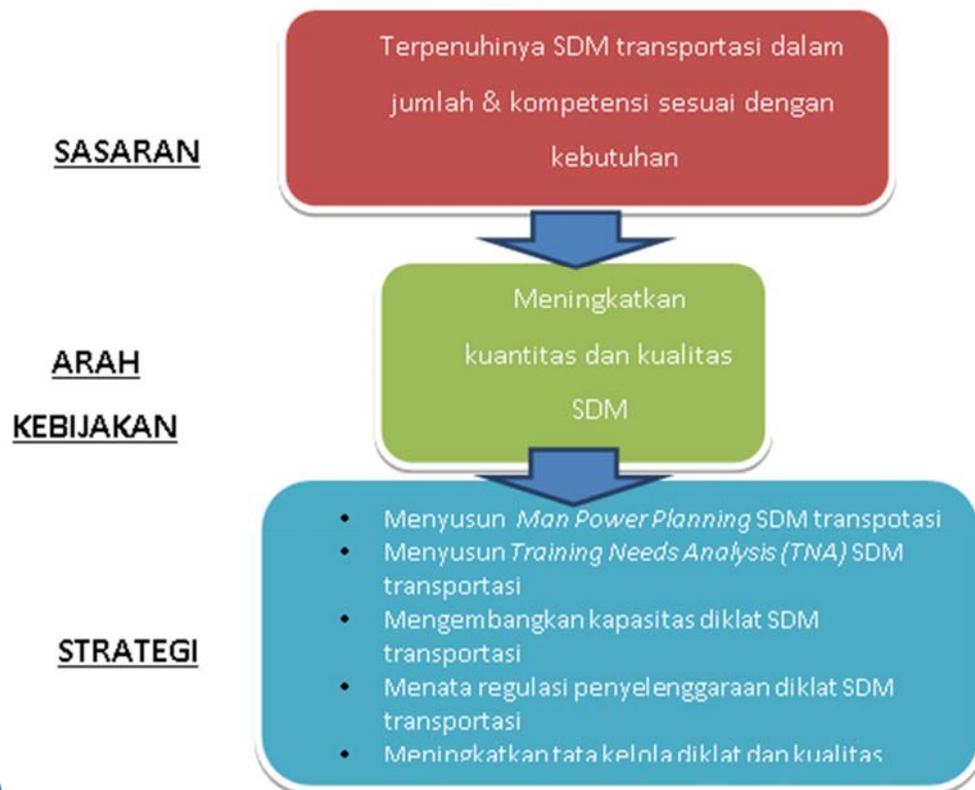
Permasalahan yang dihadapi Badan Pengembangan SDM Perhubungan antara lain:

- a. Tidak tersedianya SDM yang mencukupi untuk tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan tenaga kependidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas.
- b. Sarana dan prasarana yang sebagian sudah *out of date* dan belum mencukupi untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Sistem diklat yang belum terintegrasi melalui sistem informasi yang terkomputerisasi.

- d. Belum ada rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang.
- e. Manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM masih perlu disempurnakan agar koordinasi kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang strategis.

2. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan sasaran pembangunan infrastruktur transportasi tahun 2015-2019 Badan Pengembangan SDM Perhubungan Arah kebijakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yaitu “Meningkatkan kualitas dan Kuantitas SDM di Bidang Transportasi”.



Gambar 1.3
Susunan Organisasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Berdasarkan Arah kebijakan diatas diperoleh strategi Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut :

a. Menyusun *Man Power Planning* SDM Transportasi

Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang jumlah dan kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Perhubungan baik sumber daya manusia aparatur maupun non aparatur (masyarakat) yang akan digunakan sebagai data utama dalam penyelenggaraan berbagai program pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia Perhubungan sesuai dengan kebutuhan.

b. Menyusun *Training Needs Analysis (TNA)* SDM Transportasi;

Diklat transportasi yang selama ini dilaksanakan masih belum sepenuhnya terkoordinasi dengan subsektor khususnya dalam menggali kebutuhan SDM baik kompetensi maupun kuantitas yang dibutuhkan, sehingga penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan masih belum efektif, efisien dan tepat sasaran. Untuk kedepannya BPSDMP mengharapkan program diklat menjadi salah satu komponen utama dalam penentuan *man power planning* SDM Perhubungan, untuk itulah dibutuhkan penyusunan *Training Needs Analysis*.

c. Mengembangkan kapasitas diklat SDM Transportasi

Dalam upaya pengembangan kapasitas diklat dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat melalui perbaikan, pembangunan, modernisasi dan optimalisasi sarana dan prasarana diklat. Perbaikan dan/atau pembangunan prasarana di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dapat dilakukan secara sistematis, terencana, terukur dan berkelanjutan, dengan indikator terpenuhinya standar sarana prasarana sesuai konvensi nasional dan internasional.

Strategi pembangunan sarana dan prasarana diklat dilakukan berdasarkan pertimbangan akan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan di wilayah NKRI baik untuk diklat transportasi darat, laut, udara dan perkeretaapian. Selain pembangunan kampus baru juga dilakukan pembangunan berupa pengembangan kampus di lingkungan UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan guna meningkatkan kapasitas dalam pencapaian target pemenuhan kebutuhan SDM Transportasi. Untuk menunjang terselenggaranya diklat tersebut, BPSDM Perhubungan melakukan pengadaan, peningkatan dan rehabilitasi sarana diklat seperti alat praktek, simulator dan sarana penunjang lainnya yang berbasis IT khususnya elektronika seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tenaga pengajar dan metode diklat merupakan faktor penting lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas diklat SDM Transportasi. Tenaga pengajar di lingkungan BPSDM Perhubungan yang terdiri dari Dosen, Widyaiswara dan Instruktur perlu dilakukan *upgrading skill* dan kompetensi secara berkala guna mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan isu-isu transportasi dunia sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan perkembangan dunia transportasi.

Selain itu, *update* metode diklat, baik kurikulum dan silabus perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi transportasi.

d. Menata Regulasi penyelenggaraan diklat SDM Transportasi

Bentuk, struktur, sistem dan organisasi harus senantiasa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi. Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM

Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan SDM transportasi.

e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan;

Badan Pengembangan SDM Perhubungan merupakan suatu organisasi yang bersifat dinamis, sehingga diperlukan upaya yang senantiasa memperhatikan dan menganalisis dinamika lingkungan strategis yang ada, baik isu strategis nasional dan isu strategis internasional.

Salah satu upaya penunjang untuk mengembangkan SDM Transportasi yaitu Restrukturisasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang disertai dengan penyiapan regulasi. Restrukturisasi kelembagaan mencakup peningkatan status lembaga pendidikan serta pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) di seluruh UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan, peningkatan Balai Pendidikan dan Pelatihan menjadi Pendidikan Tinggi (Politeknik/Akademi), dan Eselonisasi atau penyempurnaan eselon (peningkatan eselon) untuk beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), penyempurnaan organisasi Sekolah Tinggi menjadi Institut dan juga harus terbuka terhadap organisasi multimoda transportasi dalam rangka ikut mendukung sistem logistik nasional serta pembentukan unit dalam organisasi yang secara khusus menangani dan mengelola kinerja pegawai BPSDM Perhubungan.

f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi

Peningkatan penyerapan lulusan diklat dapat dilakukan dengan melakukan inventarisasi data lulusan diklat transportasi melalui penyusunan database lulusan diklat di lingkungan BPSDM Perhubungan, serta upaya promosi dan sosialisasi secara optimal dalam skala yang lebih luas. Komitmen bersama dan kerjasama

dengan *stakeholder*, baik dalam skala nasional maupun internasional perlu dilakukan sebagai salah satu upaya percepatan penyerapan lulusan diklat transportasi.

H. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada dasarnya mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan selama Tahun 2015. Capaian Kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2015 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capai kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa mendatang. Maka sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang penjelasan umum organisasi, dengan menekankan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam Bab II ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam Perencanaan dan Perjanjian Kinerja (Dokumen Perjanjian Kinerja) pada tahun bersangkutan.

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta *alternative* solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dalam memperjelas Laporan Kinerja (LAKIP) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015, dapat dilampirkan Tabel Rencana STrategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015-2019, Tabel Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015, Tabel Perjanjian Kinerja (PK) Badan

Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015 dan Tabel Pencapaian Sasaran Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015 serta tabel perbandingan capaian kinerja tahun 2011 sampai dengan 2015.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

A. RENCANA KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah di sahkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mengalami perubahan dan telah disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 68 Tahun 2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan sehingga mengakibatkan penyesuaian pada Unit Kerja Eselon I dilingkungan Kementerian Perhubungan termasuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Indikator Kinerja Utama yang dipaparkan pada dokumen LAKIP Tahun 2015 ini merupakan Indikator Kinerja Utama yang lebih berorientasi kepada capaian *outcomes* sehingga lebih menggambarkan capaian kinerja Badan Pengembangan SDM perhubungan.

1. Target Kinerja Badan Pengembangan Sdm Perhubungan 2015 - 2019

Target Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2015 - 2019 yang telah di tuangkan dalam dokumen RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	288.161	300.752	299.672	303.558	303.080
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	266.844	284.305	284.623	289.687	294.779

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	361	385	391	401	413
		4	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	57	62	67	64	65
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (<i>Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum</i>) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	71	72	68	70
		6	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur	Dokumen	76	71	72	68	70

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
		Perhubungan yang berbasis kompetensi.						
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	141	160	133	139	136
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	2	2	1	0	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> Serta <i>Public Private Partnership</i> .	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	76	83	90	94	100
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	86	87	88	89	90
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	88	90	92	93	94
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	11.681.528.642.759	11.915.159.215.614	12.153.462.399.926	12.396.531.647.925	12.644.462.280.883

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET				
					2015	2016	2017	2018	2019
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	4	4	4	4	4
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	2.664	8.686	2.692	1.996	1.908
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan	M ²	1.219.522	685.256	455.662	519.448	278.615

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	
			Aparatur Perhubungan.						
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.509	3.899	4.289	4.679	5.069

2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015

Rencana Kinerja Tahunan 2015 Badan Pengembangan SDM Perhubungan berdasarkan sasaran yang telah di tuangkan dalam dokumen RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	288.161 Orang
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	266.844 Orang
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	361 Dokumen
		4	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	57 Sistem
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (<i>Harmonization, Compliance and</i>	5	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	76 Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET
	<i>Demand Fullfillment Curriculum</i>) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	6	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	76 Dokumen
		7	Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	141 Dokumen
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	2 Lembaga
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> Serta <i>Public Private Partnership</i> .	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	76 Dokumen
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	86 Nilai
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	88 (%)
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	11.681.528.642.759 Rp.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	4 Peraturan
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	2.664 Unit
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	1.219.522 M ²
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	3.509 Orang

B. PERJANJIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2015

Perjanjian Kinerja atau Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan 2011-2015 yang memuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan. Penetapan Kinerja ini untuk merinci dan memperjelas target-target kinerja yang akan dicapai kurun waktu satu tahun serta untuk mempermudah terkait dengan sumber daya dan anggaran yang

telah ditetapkan (pagu defenitif). Akuntabilitas kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam Laporan Kinerja.

Maksud perjanjian kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015 adalah untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Dalam mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RENSTRA), maka ditetapkan target kinerja tahunan. Target kinerja tahunan yang dicantumkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja terdapat perbedaan dikarenakan adanya tinjau ulang Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2011-2015. Adapun tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut :

NO	SASARN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	TARGET PK REVISI
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	269.297	292.693
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	255.870	281.204
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	80	83

NO	SASARN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	TARGET PK REVISI	
		4	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	30	32
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (<i>Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum</i>) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	82	79
		6	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	24	68
		7	Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	81	244
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	12	12
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, <i>International Recognition</i> Serta <i>Public Private Partnership</i> .	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	35	38
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	86	87,00

NO	SASARN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	TARGET PK REVISI	
	Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	89	89,25
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	9.868.372.564.459	12.951.198.626.401
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	15	15
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	1.749	845
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M ²	195.201	253.143,70
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.364	3.544

Total pagu awal Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada DIPA Tahun Anggaran 2015 adalah **Rp. 3.973.685.231.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian Persumber dana (*dalam ribuan rupiah*):

- RM	:	Rp.	3.481.972.706,-
- PNB	:	Rp.	127.612.839,-

- **BLU** : **Rp. 364.099.686,-**
- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut (*dalam ribuan rupiah*):
 - **Belanja Pegawai** : **Rp. 342.042.984,-**
 - **Belanja Barang** : **Rp. 1.982.974.695,-**
 - **Belanja Modal** : **Rp. 1.648.667.552,-**

Menjadi **Rp. 4.532.882.248.000,-** karena Perubahan Target BLU/PNBP dengan rincian sebagai berikut:

- Rincian Persumber dana (*dalam ribuan rupiah*):
 - **RM** : **Rp. 3.909.872.706,-**
 - **PNBP** : **Rp. 191.695.006,-**
 - **BLU** : **Rp. 431.314.536,-**
- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut (*dalam ribuan rupiah*):
 - **Belanja Pegawai** : **Rp. 348.388.168,-**
 - **Belanja Barang** : **Rp. 2.173.587.952,-**
 - **Belanja Modal** : **Rp. 2.010.906.128,-**

Kegiatan strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) pada tahun 2015 meliputi:

a. Peningkatan Kualitas SDM Perhubungan Aparatur Dan Masyarakat, terdiri dari:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi aparatur dan masyarakat antara lain:
 - a) Program Diklat Pembentukan Kompetensi Kepelautan bagi masyarakat dan aparatur Ditjen Perhubungan Laut sebanyak 480 orang;
 - b) Program Kerjasama Selatan-Selatan dalam rangka *Capacity Building* sebanyak 129 orang ;
 - c) Program Beasiswa Rintisan Gelar S2/S3 SDM Aparatur Kementerian Perhubungan sebanyak 309 orang ;
 - d) Program Beasiswa Putra – Putri Papua dan Papua Barat (UP4B) untuk pendidikan penerbang sebanyak 20 orang (9 orang penerimaan baru dan 11 orang lanjutan), dan 7 orang pendidikan teknik penerbangan (lanjutan); dan

- e) Program pelatihan tenaga terampil bersertifikat dalam rangka *ASEAN Economic Community 2015*
- 2) Pengadaan Peralatan dalam pemenuhan kurikulum antara lain:
 - a) Pengadaan Pesawat Latih di STPI dan LP3 Banyuwangi;
 - b) Peralatan praktek/peraga diklat
 - c) Peralatan Laboratorium dan Simulator

b. Pembangunan Kampus Baru dan Lanjutan :

- 1) Pembangunan Kampus Baru Akademi KA Madiun tahap V, BP2TD Kalimantan Tahap III, BP2IP Sumatera Barat Tahap IV, BP2IP Sulawesi Utara Tahap III, Pusat Pembangunan Karakter SDM Perhubungan di Jawa Barat (Ciwidey) Tahap III, BPPP Curug Tahap I;
- 2) Pembangunan Pengembangan Kampus PKTJ Tegal Tahap IV, Pembangunan Pengembangan Kampus BPPTD Bali Tahap I, Pembangunan Pengembangan Kampus PIP Semarang Tahap I;
- 3) Pembangunan pengembangan kampus Terpadu Pendidikan dan Pelatihan Transportasi di Makassar :
 - a) Pembangunan pengembangan Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar Tahap VI;
 - b) Pembangunan ATKP Makassar Tahap III (pindah karena faktor keselamatan penerbangan Bandara Hasanuddin);
 - c) Pembangunan Kampus Baru BP2TD Makassar Tahap III.

c. Perencanaan Pembangunan Kampus Baru :

- 1) Perencanaan Pembangunan Pembangunan Balai Pelatihan dan Pengujian Kompetensi Pelaut (BP2KP) di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur (Studi Kelayakan);
- 2) Perencanaan Pembangunan Sekolah Penerbangan di Papua (*Review Master Plan*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
TAHUN 2015

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Untuk mengukur kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan, capaian kinerja pada setiap kegiatan yang mendukung pemenuhan sasaran tertentu dilakukan pengukuran dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang telah ditetapkan, sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalan organisasi. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan dimungkinkan dengan adanya sejumlah deviasi/celah kinerja, sehingga diperlukan strategi perbaikan untuk mewujudkan capaian kinerja yang lebih baik dimasa mendatang.

**A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
TAHUN 2015**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Pengukuran kinerja dilakukan dengan melihat capaian realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) yang berbasis *outcome*.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan untuk tahun 2015 Badan Pengembangan SDM Perhubungan ditargetkan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Di Bidang Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan dengan realisasi sebagaimana dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET PK	REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2014				% CAPAIAN
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	292.693	101.986	198.127	328.161	463.061	158,21
Rata - Rata Capaian Sasaran										158,21
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	281.204	90.768	191.306	317.412	448.901	159,64
Rata - Rata Capaian Sasaran										159,64
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	83	3	7	11	28	33,73
		4	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	32	1	2	5	22	68,75
Rata - Rata Capaian Sasaran										51,24
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	79	15	45	66	83	105,06
		6	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.		68	15	45	66	81	119,12
		7	Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara,	Dokumen	244	304	304	320	514	210,66

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2014				% CAPAIAN	
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
		Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.								
Rata - Rata Capaian Sasaran									144,95	
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	12	0	0	0	7	58,33
Rata - Rata Capaian Sasaran									58,33	
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	38	19	31	63	105	276,32
Rata - Rata Capaian Sasaran									276,32	
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	87,00	0	90	90,46	90,46	103,98
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	89,25	4,01	15,76	40,04	83,19	93,21
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	12.951.198.626.401,00	8.467.705.565.227	8.467.705.565.227	8.467.705.565.227	13.034.924.807.142	100,65
Rata - Rata Capaian Sasaran									99,28	
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	15	0	8	8	35	233,33

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2014				% CAPAIAN	
					TW I	TW II	TW III	TW IV		
Rata - Rata Capaian Sasaran									233,33	
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	845	0	43	438	1.113	131,72
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	253.144	0,00	25.486,00	58.846,00	254.521,22	100,54
Rata - Rata Capaian Sasaran									116,13	
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.544	2.157	2.192	2.632	2.568	72,46
Rata - Rata Capaian Sasaran									72,46	

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai 10 (sepuluh) Sasaran Startegis yang terangkum di dalam 1 (satu) program dengan didukung oleh 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 telah berhasil mencapai 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sedangkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) walaupun sudah cukup baik capaiannya tapi masih belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Rata-rata pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015 ini adalah sebesar 126,61%.

- a. Sasaran Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima
 - Pada indikator kinerja "Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan,

pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 463.061 orang dari target sebesar 292.693 orang atau mencapai 158,21% dari target.

b. Sasaran Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika

- Pada indikator kinerja “Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 281.204 orang dari target sebesar 448.901 orang atau mencapai 159,64% dari target.

c. Sasaran Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi;

- Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 28 dokumen dari target sebesar 83 dokumen atau mencapai 33,73% dari target.
- Pada indikator kinerja “Jumlah sistem informasi yang dibangun” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 22 sistem dari target sebesar 32 sistem atau mencapai 68,75% dari target.

d. Sasaran Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (*Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum*) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK

- Pada indikator kinerja “Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetens” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 83 dokumen dari target sebesar 79 dokumen atau mencapai 105,06% dari target.

- Pada indikator kinerja “Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 81 dokumen dari target sebesar 68 dokumen atau mencapai 119,12% dari target.
 - Pada indikator kinerja “Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 514 dokumen dari target sebesar 244 dokumen atau mencapai 210,66% dari target.
- e. Sasaran Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
- Pada indikator kinerja “Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU)” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 7 lembaga dari target 12 lembaga atau mencapai 58,33% dari target.
- f. Sasaran Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition* Serta *Public Private Partnership*;
- Pada indikator kinerja “Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi” nilai realisasi pada tahun 2014 sebesar 105 dokumen dari target sebesar 38 dokumen atau mencapai 276,32% dari target.
- g. Sasaran Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan
- Pada indikator kinerja “Nilai AKIP BPSDM Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 90,46 dari target sebesar

87,00 atau mencapai 103,98% dari target. Realisasi nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2014 dengan periode penilaian pada tahun 2015 berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor UM.007/28/22/ITJEN-2015 tanggal 26 Juni 2015.

- Pada indikator kinerja “Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 83,19% dari target sebesar 89,25% atau mencapai 93,21% dari target.
- Pada indikator kinerja “Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar Rp. 13.034.924.807.142,- dari 100,65,34% dari target dan nilai tersebut belum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

h. Sasaran Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional;

- Pada indikator kinerja “Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 35 peraturan dari target sebesar 15 peraturan atau mencapai 233,33% dari target.

i. Sasaran Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional

- Pada indikator kinerja “Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 1.113 unit dari target sebesar 845 unit atau mencapai 131,72% dari target.
- Pada indikator kinerja “Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar

254.521,22 M² dari target sebesar 253.144 M² atau mencapai 100,54 dari target.

- j. Sasaran Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika
- Pada indikator kinerja “Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika” nilai realisasi pada tahun 2015 sebesar 2.568 orang dari target sebesar 3.544 orang atau mencapai 72,46% dari target.

2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2011-2015

Dalam mengukur tingkat capaian kinerja sasaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan dilakukan dengan mengevaluasi target dan realisasi tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari setiap sasaran yang ditetapkan pada tahun 2011 - 2015 sebagaimana yang ditunjukkan dalam Pengukuran Kinerja dengan 10 (sepuluh) Sasaran Startegis yang terangkum di dalam 1 (satu) program dengan didukung oleh 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2011			2012			2013			2014			2015			
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	127.736	149.294	116,88	158.305	175.793	111,05	178.821	214.807	120,12	206.652	298.752	144,57	292.693	463.061	158,21
Rata - Rata Capaian Sasaran						116,88			111,05			120,12			144,57			158,21	
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan	Orang	121.476	140.246	115,45	149.216	162.364	108,81	173.821	201.838	116,12	193.010	283.602	146,94	281.204	448.901	159,64

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2011			2012			2013			2014			2015			
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
		beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan																	
Rata - Rata Capaian Sasaran						115,45			108,81			116,12			146,94			159,64	
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	16	15	93,75	94	100	106,38	16	16	100,00	62	62	100,00	83	28	33,73
		4	Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	9	9	100,00	17	17	100,00	43	36	83,72	19	18	94,74	32	22	68,75
Rata - Rata Capaian Sasaran						96,88			103,19			91,86			97,37			51,24	
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand	5	Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan	Dokumen	74	69	93,24	33	30	90,91	15	42	280,00	37	37	100,00	79	83	105,06

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2011			2012			2013			2014			2015			
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
	Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.		yang berbasis kompetensi.																
		6	Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Doku men				1	1	100,00	7	35	500,00	24	24	100,00	68	81	119,12
		7	Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Doku men				229	664	289,96	80	78	97,50	56	49	87,50	244	514	210,66
Rata - Rata Capaian Sasaran						93,24			160,29			292,50			95,83			144,95	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2011			2012			2013			2014			2015			
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lemba ga	3	3	100,00	1	0	0,00	2	0	0,00	1	0	0,00	12	7	58,33
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			0,00			0,00			0,00			58,33	
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Doku men	3	3	100,00	4	38	950,00	21	27	128,57	41	87	212,20	38	105	276,32
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			950,00			128,57			212,20			276,32	
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai		77,65		89,50	89,50	100,00	94,09	85,19	90,54	85,50	91,75	107,31	87,00	90,46	103,98
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)		84,78		82,17	86,38	105,12	92,00	85,96	93,43	92,00	84,74	92,11	89,25	83,19	93,21

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATU AN	2011			2012			2013			2014			2015			
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
	BMN BPSDM Perhubungan.	12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	7.620.589 .521.610	7.675.583. 893.193	100,72	8.814.55 1.692.64 3	8.897.224 .987.516	100,94	10.163.97 2.093.749	10.249.34 1.492.656	100,84	11.125.26 5.374.056	11.255.93 8.104.851	101,17	12.951.1 98.626.4 01	13.034.9 24.807.1 42	100,65
Rata - Rata Capaian Sasaran										102,02			94,94			100,20			99,28
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	22	22	100,00	12	20	166,67	20	21	105,00	10	10	100,00	15	35	233,33
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			166,67			105,00			100,00			233,33	
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	15.135	15.135	100,00	18.241	20.030	109,81	5.919	5.867	99,12	215	208	96,74	845	1.113	131,72

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2011			2012			2013			2014			2015			
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	775.964	732.592	94,41	261.062	244.111	93,51	680.060	679.392	99,90	459.960	330.281,88	71,81	253.143,70	254.521,22	100,54
Rata - Rata Capaian Sasaran						97,21			101,66			99,51			84,28			116,13	
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	1.848	1.848	100,00	2.905	2.578	88,74	2.518	2.524	100,24	3.072	2.545	82,85	3.544	2.568	72,46
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			88,74			100,24			82,85			72,46	

Keterangan:

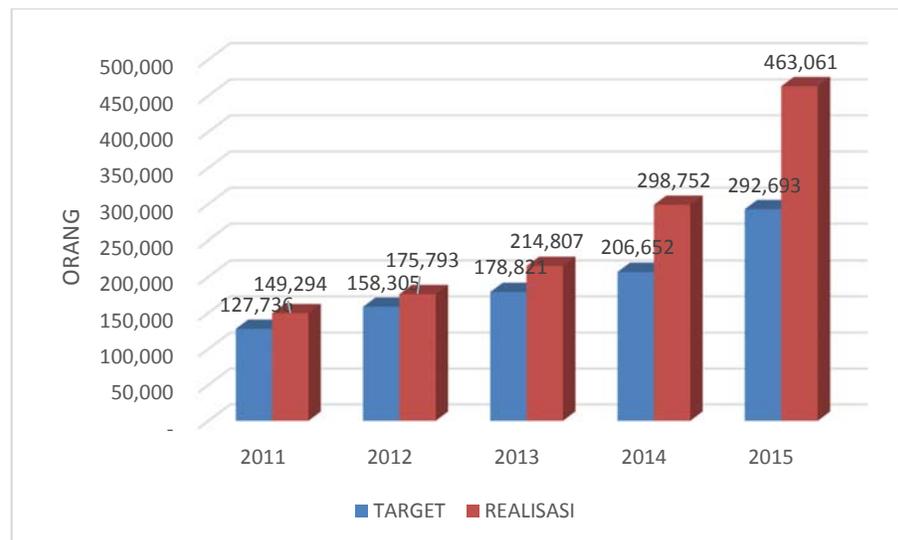
T = Target; R = Realisasi; % = Persentase

Secara rinci analisis penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima;

Untuk tercapainya Indikator Kegiatan Utama (IKU) tersebut di atas, maka Badan Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dibidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian baik untuk Aparatur Perhubungan maupun masyarakat. Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi tersebut dengan tujuan agar menghasilkan peserta yang berkompeten dibidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian.

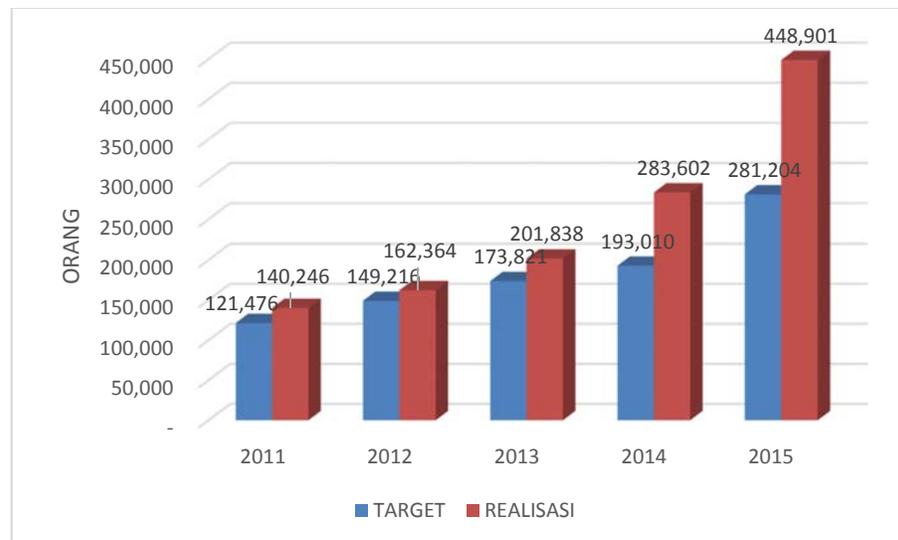
Dapat diketahui selama 5 (lima) tahun terakhir ini (2011-2015), pencapaian IKU Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 33,51%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



b. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika

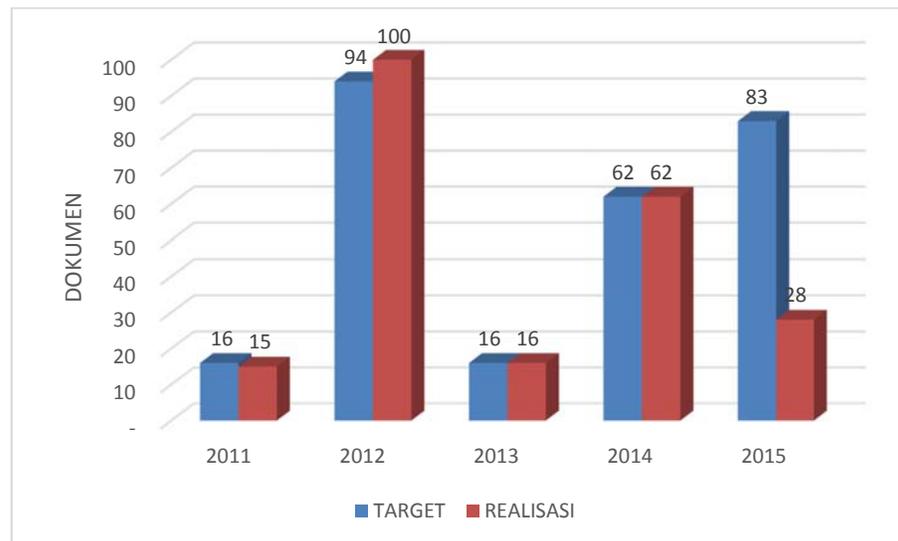
Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan dengan target lulusan sebanyak 281.204 orang dan terealisasi sebanyak 448.901 Orang atau tingkat capaiannya sebesar 159,64% dari target pada tahun 2015. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 - 2014, pada tahun 2015 ini jumlah lulusan telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Selama 2011 – 2015 tingkat capaian IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 34,72%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

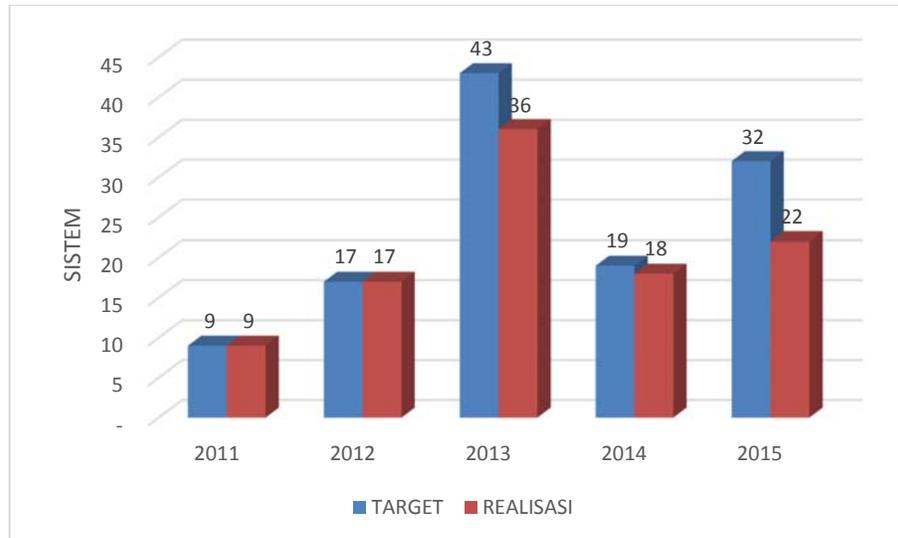


c. Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi selama tahun 2011 – 2015 tingkat capaiannya sangat bagus. Hanya pada tahun 2015 saja tidak sesuai target (33,73%), selebihnya sesuai dengan target/melebihi target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

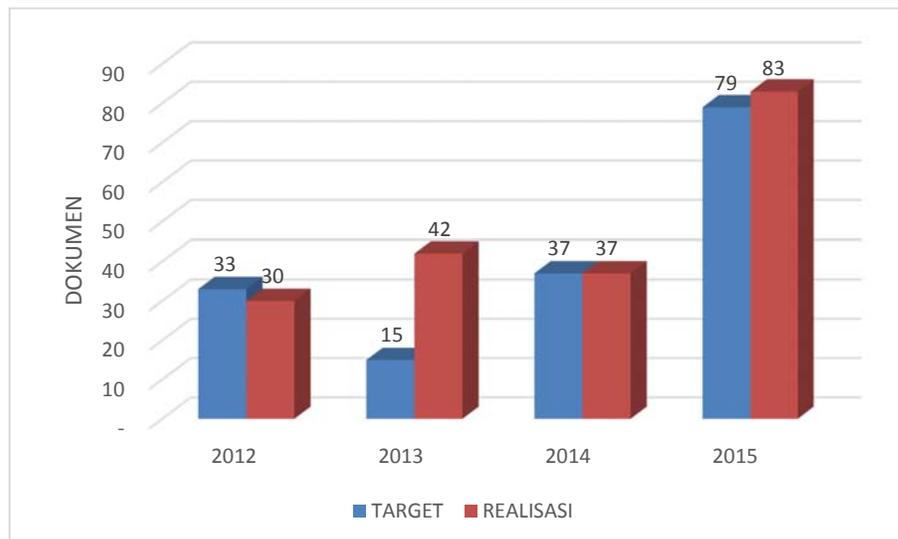


Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sistem informasi yang dibangun selama tahun 2011 – 2015 ini tidak selalu mencapai target. Pada 3 tahun terakhir tingkat capaiannya belum mencapai target. Meskipun begitu, Badan Pengembangan SDM Perhubungan tetap akan meningkatkan kinerjanya agar kedepan target tersebut dapat tercapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

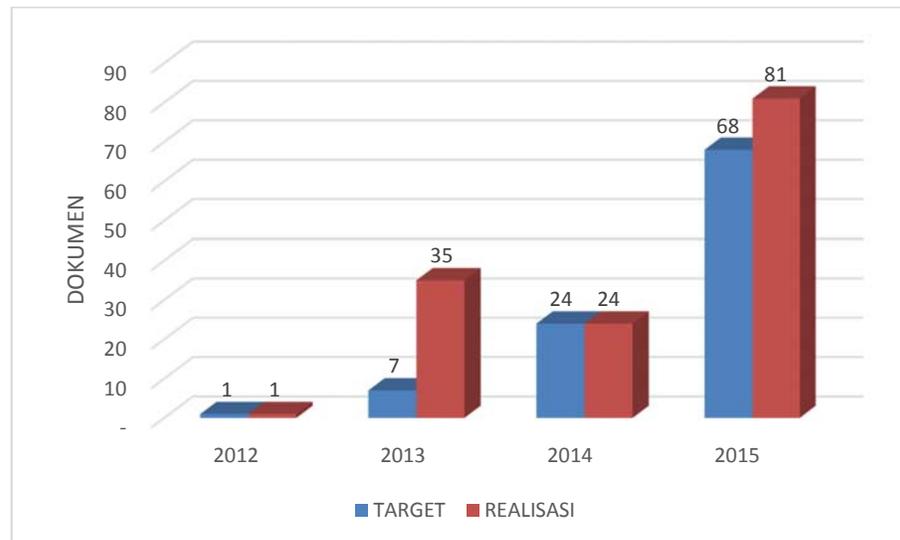


- d. Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (*Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum*) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK

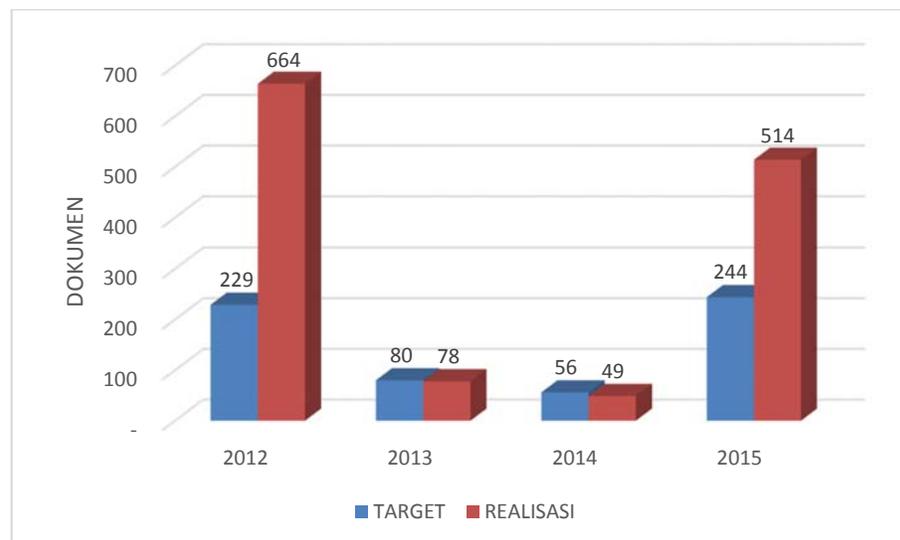
Grafik capaian kinerja untuk IKU “Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” selama tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut:



Grafik capaian kinerja untuk IKU “Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” selama tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut:



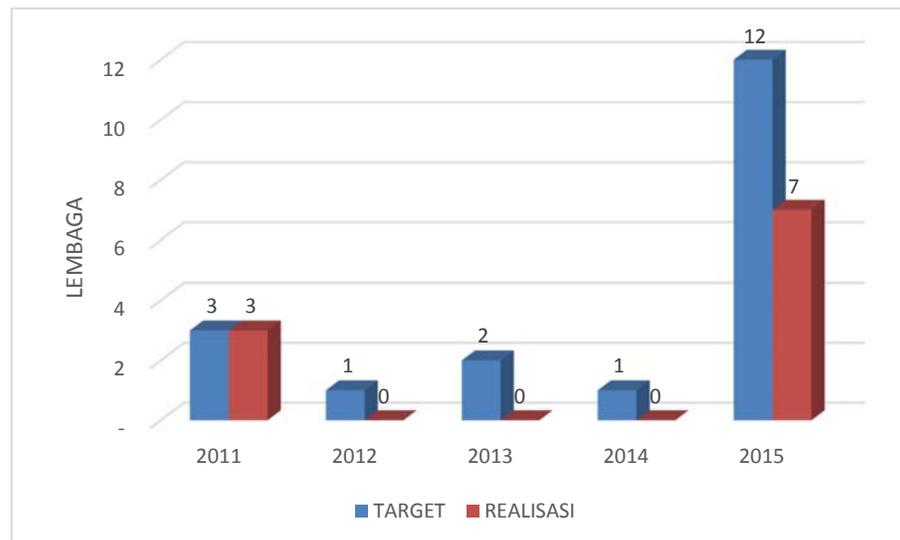
Grafik capaian kinerja untuk IKU “Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi” selama tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut:



- e. Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)

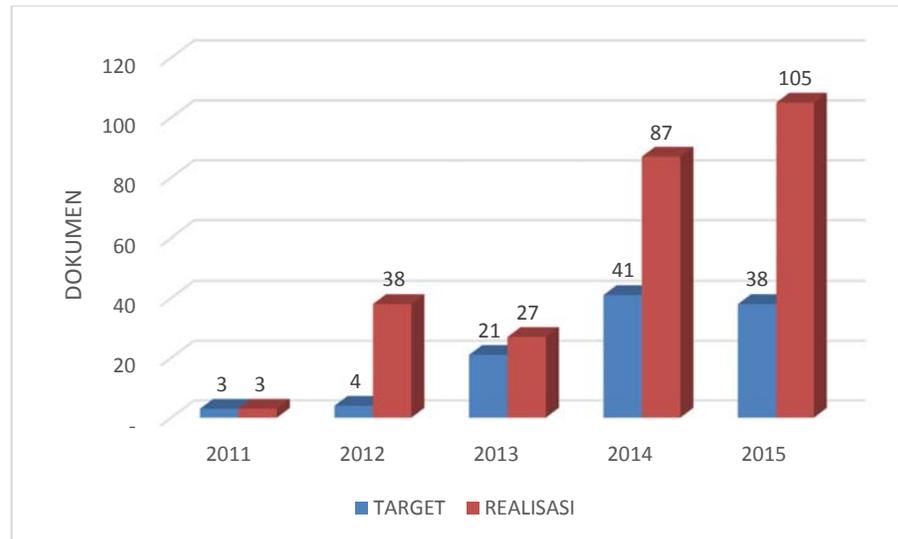
Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) mulai tahun 2012 tidak tercapai/tidak ada Satker/UPT di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang menjadi BLU. Hal ini dikarenakan adanya penyempurnaan PP 23 Tahun 2005, maka Kementerian Keuangan mengambil kebijakan untuk menunda memproses pembentukan Satker BLU.

Berikut grafik capaian kinerja sasaran “Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU)” selama tahun 2011 – 2015:



- f. Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition* Serta *Public Private Partnership*
Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang Diklat

Transportasi ini merupakan Jumlah dokumen kerjasama antara lembaga diklat dengan pihak ketiga, selama tahun 2011 – 2015 selalu tercapai targetnya, bahkan mulai tahun 2012 tingkat capaiannya sudah melebihi dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di grafik berikut ini:



g. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan

Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Nilai AKIP BPSDM Perhubungan merupakan nilai AKIP ini merupakan nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan periode/tahun sebelumnya. Selama tahun 2011 – 2015 nilai AKIP BPSDM mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan memperoleh nilai sebesar 90,46, dengan kategori AA.



Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan selama tahun 2011 – 2015 sudah cukup bagus, meskipun tidak mencapai target tetapi tingkat capaiannya sudah di atas 90%. Meskipun demikian Badan Pengembangan SDM Perhubungan akan tetap meningkatkan kinerjanya agar kedepannya menjadi lebih baik lagi.



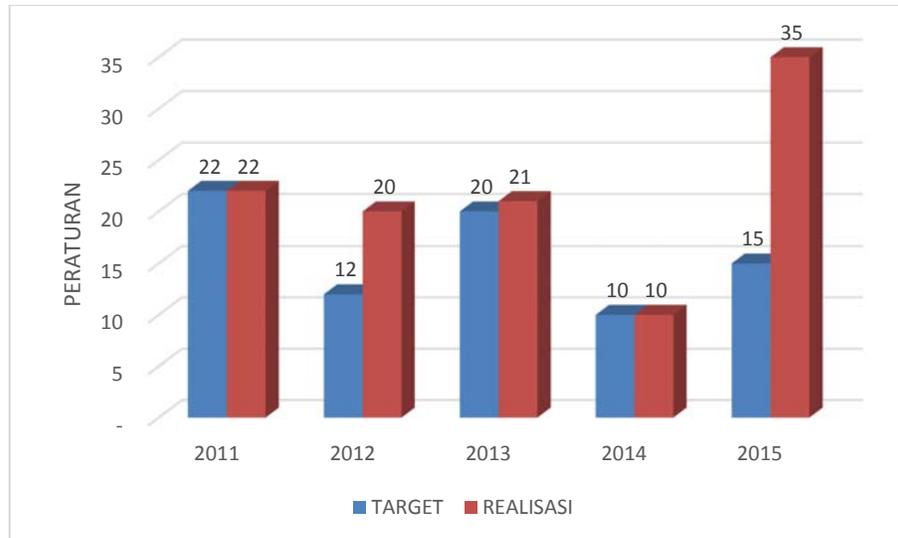
Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi selama tahun 2011 –

2015 mengalami peningkatan, dan pada tahun 2015 ini belum mencapai target.



- h. Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan merupakan Jumlah Draft peraturan Menteri Perhubungan yang telah selesai disusun yang ditargetkan akan dikirim kepada Biro Hukum, jumlah SK Kepala BPSDMP yang ditargetkan akan diterbitkan. Selama tahun 2011 – 2015 pencapaian IKU Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan selalu mencapai target/bahkan melebihi dari target. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik berikut ini:

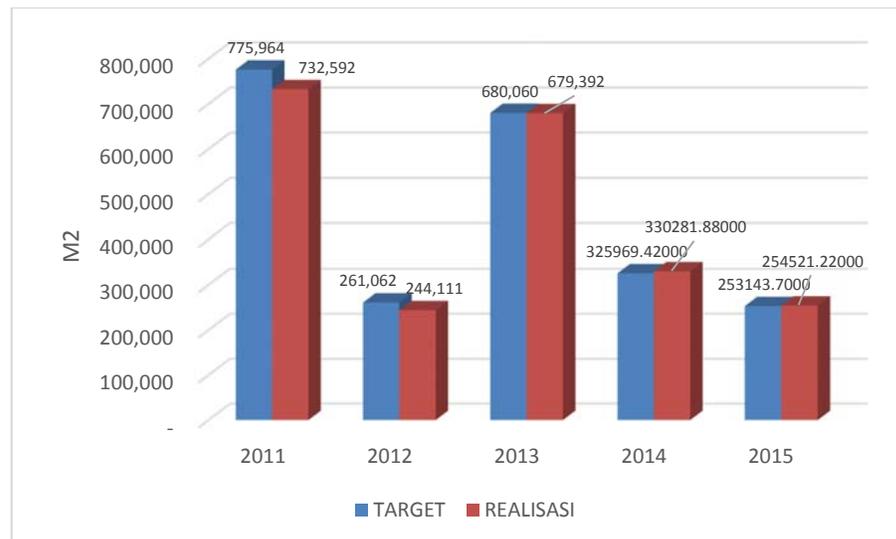


- i. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir sudah cukup baik tingkat capaiannya, meskipun hanya pada tahun 2011 dan 2015 yang telah mencapai target, pada tahun 2012, 2013 dan 2014 tingkat capaiannya sudah melebihi 85%.



Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan selama tahun 2011 – 2015 tingkat capainnya sudah cukup baik.

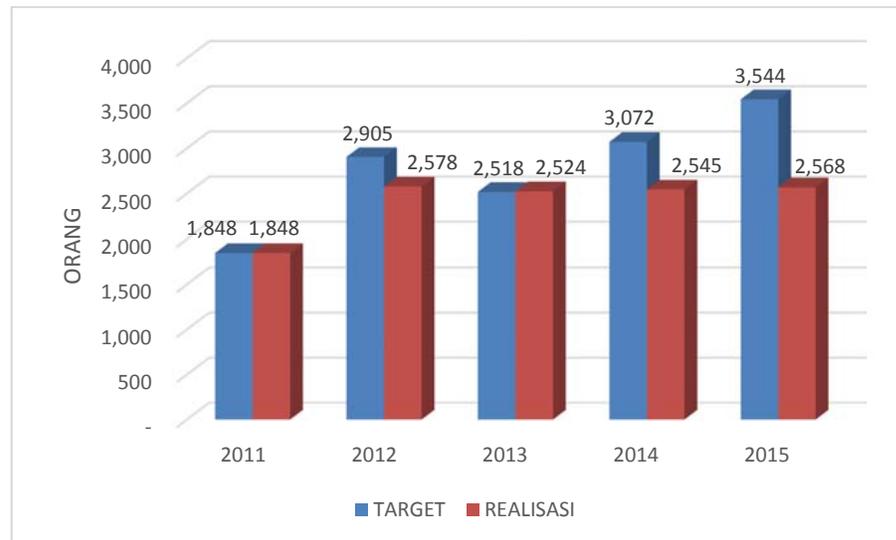


j. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika ini merupakan Jumlah Tenaga Kependidikan yang diperkirakan pada tahun anggaran bersangkutan. Target IKU tersebut sebesar 3.544 Orang telah terealisasi sebesar 2.568 Orang atau tingkat capaiannya sebesar 72,46%.

Bila dibandingkan pada tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan jumlah tenaga kependidikan tetapi dari segi tingkat pencapaian tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 72,46%. Hal ini dikarenakan mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 ada moratorium/pemberhentian sementara penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan

Bersama 3 Menteri : Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, 800-632 Tahun 2011 dan 141/PMK,01/2011, tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka Badan Pengembangan SDM Perhubungan tidak dapat melakukan penambahan pegawai baru.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA)

Untuk melakukan evaluasi kinerja diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan. Karenanya Indikator Kinerja Utama (IKU) harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai atau berfungsi. Evaluasi kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan;
2. Tingkat Pencapaian Sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing sasaran yang

telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Persentase tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Berikut perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2015 dengan target jangka menengah (RENSTRA):

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	288.161	463.061	160,70
Rata - Rata Capaian Sasaran						160,70
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	266.844	448.901	168,23
Rata - Rata Capaian Sasaran						168,23
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	361	28	7,76
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	57	22	38,60
Rata - Rata Capaian Sasaran						23,18
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	83	109,21
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	81	106,58
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	141	514	364,54
Rata - Rata Capaian Sasaran						193,44

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	% CAPAIAN	
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	3	7	233,33
Rata - Rata Capaian Sasaran							233,33
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	76	105	138,16
Rata - Rata Capaian Sasaran							138,16
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	86,00	90,46	105,19
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	88,00	83,19	94,53
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	11.681.528.642.759	13.034.924.807.142	111,59
Rata - Rata Capaian Sasaran							103,77
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	4	35	875,00
Rata - Rata Capaian Sasaran							875,00
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	2.664	1.113	41,78
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	1.219.522	254.521	20,87
Rata - Rata Capaian Sasaran							31,32
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.509	2.568	73,18
Rata - Rata Capaian Sasaran							73,18

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 telah berhasil mencapai 10

(sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai/melebihi dari target jangka menengah (RENSTRA) yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program sampai dengan tahun 2015 BPSDM Perhubungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang perlu ditindaklanjuti. Permasalahan – permasalahan tersebut lah yang menjadi sebab utama tidak tercapainya ke-7 (tujuh) IKU BPSDM Perhubungan yang telah ditargetkan di dalam RENSTRA. Secara umum beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Tidak tersedianya SDM yang mencukupi untuk tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan tenaga kependidikan baik dari sisi kuantitas dan kualitas.
- b. Sarana dan prasarana yang sebagian sudah *out of date* dan belum mencukupi untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c. Sistem diklat yang belum terintegrasi melalui sistem informasi yang terkomputerisasi.
- d. Belum ada rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang.
- e. Manajemen penyelenggaraan pengembangan SDM masih perlu disempurnakan agar koordinasi kegiatan bisa berjalan dengan lebih baik, khususnya untuk kegiatan-kegiatan yang strategis.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Serta Alternatif Solusi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU)

Secara rinci analisis penjelasan hasil evaluasi pelaksanaan pencapaian akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima;

Untuk tercapainya Indikator Kegiatan Utama (IKU) tersebut di atas, maka Badan Pengembangan SDM Perhubungan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dibidang Transportasi Darat,

Laut, Udara, dan Perkeretaapian baik untuk Aparatur Perhubungan maupun masyarakat. Badan Pengembangan SDM Perhubungan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Transportasi tersebut dengan tujuan agar menghasilkan peserta yang berkompeten dibidang Transportasi Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian.

Jumlah peserta yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan pada tahun 2015 dengan target peserta yang telah ditetapkan sebanyak 292.693 orang. Dari target tersebut, realisasi jumlah peserta yang dicapai sebanyak 463.061 orang (158,21%).

Pencapaian kinerja yang melebihi target untuk peserta pendidikan dan pelatihan ini dikarenakan adanya program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan kerjasama dengan pihak lain, serta program pendidikan dan pelatihan untuk Badan Layanan Umum (BLU) dimana peserta pendidikan dan pelatihan tersebut dari masyarakat yang tidak tertera dalam DIPA.

Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 - 2014, pada tahun 2015 ini jumlah peserta dan tingkat pencapaiannya telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Berikut rincian jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana berikut:

NO	URAIAN		SATUAN	JUMLAH PESERTA				
				2011	2012	2013	2014	2015
1	SDM PERHUBUNGAN DARAT		Orang	5.023	6.702	6.999	6.673	6.930
	a.	Pendidikan Pembentukan	Orang	1.023	1.247	1.324	1.655	1.853
	b.	Pendidikan Penjenjangan	Orang	39	41	17	16	13

NO	URAIAN		SATUAN	JUMLAH PESERTA				
				2011	2012	2013	2014	2015
	c.	Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>)	Orang	3.378	5.181	5.166	5.002	5.064
	d.	Pelatihan Lainnya	Orang	583	233	492	0	0
2	SDM PERHUBUNGAN LAUT		Orang	130.001	153.604	188.349	274.648	433.248
	a.	Pendidikan Pembentukan	Orang	6.953	8.978	8.972	14.891	10.017
	b.	Pelatihan Penjenjangan	Orang	17.595	20.169	20.526	22.340	46.445
	c.	Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)/Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>)	Orang	104.168	122.797	154.764	237.297	376.253
	d.	Pelatihan Lainnya	Orang	1.285	1.660	4.087	120	533
3	SDM PERHUBUNGAN UDARA		Orang	5.491	7.705	10.601	8.245	10.572
	a.	Pendidikan Pembentukan	Orang	2.338	2.602	2.699	2.953	3.263
	b.	Pendidikan Penjenjangan	Orang	288	200	118	248	200
	c.	Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>)	Orang	2.497	4.514	6.235	4.951	6.751
	d.	Pelatihan Lainnya	Orang	368	389	1.549	93	358
4	PPSDM APARATUR PERHUBUNGAN DAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN		Orang	8.779	7.782	8.858	9.186	12.311
	a.	Pelatihan Prajabatan	Orang	4.774	0	91	461	787
	b.	Pelatihan Struktural/Kepemimpinan	Orang	336	476	488	413	280
	c.	Pelatihan Fungsional	Orang	40	156	145	163	149
	d.	Pelatihan Teknis Manajerial	Orang	479	2.495	2.709	3.025	3.504
	e.	Pelatihan Lainnya	Orang	0	0	0	0	0
	f.	Rintisan Gelar S2/S3	Orang	300	298	323	353	126
	g.	Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	2.850	4.357	5.102	4.771	7.465
GRAND TOTAL			Orang	149.294	175.793	214.807	298.752	463.061

Sumber Data: Satker/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Pencapaian jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan selama 5 (lima) tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup tinggi, meskipun masih ada beberapa Jenis Pendidikan/Pelatihan yang mengalami penurunan tetapi secara keseluruhan total jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan ini mengalami peningkatan.

Terjadi peningkatan secara signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2015. Hal ini dikarenakan pembangunan sarana (ruang kelas, Laboratorium, Asrama dll) yang dilakukan selama tahun 2011 sampai dengan 2014 telah selesai dan dapat dipergunakan/dioperasionalkan pada tahun 2015. Pembangunan sarana (ruang kelas, Laboratorium, Asrama dll) tersebut meningkatkan jumlah dan kapasitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Saran untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah dapat dipertahankan capaian di atas 100% untuk sasaran strategis tersebut dan dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik.

- b. Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika;

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan dengan target lulusan sebanyak 281.204 orang dan terealisasi sebanyak 448.901 orang atau tingkat capaiannya sebesar 159,64% dari target. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 - 2014, pada tahun 2015 ini jumlah lulusan telah mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Ini berarti sasaran ini dapat telah melampaui target yang diharapkan. Kegiatan yang menunjang Indikator Kegiatan Utama (IKU) ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Pembentukan/Awal, Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, Pelatihan Teknis (*short course*)/Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut, Pelatihan Lainnya, Pelatihan Struktural/Kepemimpinan, Pelatihan Fungsional, Pelatihan Teknis/Manajerial, Rintisan Gelar (S2/S3) dan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM.

Berikut rincian realisasi jumlah lulusan Pendidikan dan Pelatihan yang telah diselenggarakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada 5 (lima) tahun terakhir:

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH LULUSAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	SDM PERHUBUNGAN DARAT	Orang	4.282	5.757	5.944	5.373	5.493
	a. Pendidikan Pembentukan	Orang	294	309	245	357	430
	b. Pendidikan Penjurangan	Orang	27	35	41	16	0
	c. Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>)	Orang	3.378	5.180	5.166	5.000	5.063
	d. Pelatihan Lainnya	Orang	583	233	492	0	0
2	SDM PERHUBUNGAN LAUT	Orang	124.480	144.217	180.022	264.398	423.338
	a. Pendidikan Pembentukan	Orang	1.753	1.814	1.806	3.790	2.006
	b. Pelatihan Penjurangan	Orang	17.274	17.947	19.370	23.360	45.754
	c. Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP)/Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>)	Orang	104.168	122.796	154.759	237.128	375.045
	d. Pelatihan Lainnya	Orang	1.285	1.660	4.087	120	533
3	SDM PERHUBUNGAN UDARA	Orang	3.493	5.986	8.440	5.591	8.018
	a. Pendidikan Pembentukan	Orang	348	990	614	488	813
	b. Pendidikan Penjurangan	Orang	285	172	100	127	129
	c. Pelatihan Teknis (<i>Short Course</i>)	Orang	2.492	4.435	6.177	4.883	6.718
	d. Pelatihan Lainnya	Orang	368	389	1.549	93	358
4	PPSDM APARATUR PERHUBUNGAN DAN SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN	Orang	7.991	6.404	7.432	8.240	12.052
	a. Pelatihan Prajabatan	Orang	4.774	0	91	461	786
	b. Pelatihan Struktural/Kepemimpinan	Orang	336	476	488	413	278
	c. Pelatihan Fungsional	Orang	40	148	145	163	148
	d. Pelatihan Teknis Manajerial	Orang	314	1.348	1.864	2.405	3.314
	e. Pelatihan Lainnya	Orang	0	0	0	0	0
	f. Rintisan Gelar S2/S3	Orang	70	75	65	27	61
	g. Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	2.457	4.357	4.779	4.771	7.465

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH LULUSAN				
			2011	2012	2013	2014	2015
	GRAND TOTAL	Orang	140.246	162.364	201.838	283.602	448.901

Sumber Data: Satker/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan selama 5 (lima) tahun terakhir ini secara rata-rata mengalami kenaikan. Peningkatan pencapaian target secara signifikan ini terjadi pada SDM Transportasi Laut. Hal ini dikarenakan adanya peraturan yang termuat dalam STCW 2010 Manila, bahwa setiap pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 harus disesuaikan berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010 dari tingkat dasar sampai tingkat I sebelum batas waktu tanggal 1 Januari 2017, selain itu untuk Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) guna memperoleh sertifikat keterampilan sesuai konvensi internasional IMO-SCTW 1978 dan amandemennya, sehingga permintaan diklat dari masyarakat sangat tinggi untuk diklat dimaksud. Selain itu juga dikarenakan adanya pemanfaatan anggaran BLU dan PNBP di beberapa Satker/UPT dialokasikan untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Perbedaan jumlah Peserta dengan Jumlah Lulusan bukan karena banyak peserta yang tidak lulus, melainkan karena ada beberapa peserta yang masih melanjutkan studi. Khususnya Program Pendidikan Pembentukan yang memiliki masa studi 2 sampai dengan 4 tahun (Program Diploma II, Diploma III dan Diploma IV) serta Program Pendidikan/Pelatihan Penjenjangan yang memiliki masa studi 9 bulan sampai dengan 1 tahun.

Daya serap lulusan untuk SDM Perhubungan Darat, dari total lulusan Pendidikan Pembentukan sebanyak 430 orang, 32 orang (7,44%) telah diterima bekerja dengan komposisi 1 (satu) orang telah diterima seleksai CPNS, 24 (dua puluh empat) orang bekerja di BUMN/swasta dan 7 (tujuh) orang diterima sebagai Pegawai Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Pemprov DKI Jakarta, sisanya 398 orang (92,56%) sedang menunggu panggilan kerja.

Daya serap lulusan untuk SDM Perhubungan Laut, dari total lulusan Pendidikan Pembentukan sebanyak 2.006 orang sekitar 100% telah bekerja di beberapa perusahaan pelayaran Nasional dan Internasional antar lain: Hanjin Shipping Company, PT Berlian Laju Tanker, Anthony Veder Shipping Company, Wintermar Shipping Company, Pro Maritim, NYK, Equinox, Meratus, Maersk Line, Pertamina Shipping, Jasindo dan lain-lain serta di ketatalaksanaan dan kepelabuhan.

Daya serap lulusan untuk SDM Perhubungan Udara, dari total lulusan Pendidikan Pembentukan sebanyak 813 orang, sebanyak 346 orang (42,56%) telah bekerja sebagai abdi negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS)., PT. Angkasa Pura I dan II (Persero) Tbk., Maskapai Penerbangan/*Airlines* dan di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI). Sisanya sebanyak 467 orang (57,44%) sedang menunggu panggilan untuk bekerja.

Saran untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah dapat dipertahankan capaian di atas 100% untuk sasaran strategis tersebut dan dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik.

- c. Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi;

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi dengan target sebesar 83 Dokumen hanya terealisasi sebesar 28 Dokumen atau telah tercapai 33,73%.

Indikator Kegiatan Utama (IKU) ini merupakan Jumlah dokumen pedoman yang berkaitan dengan metode/tata cara/acuan penyelenggaraan diklat. Bila dibandingkan pada tahun 2014 pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2015 ini mengalami kenaikan tetapi masih sesuai dengan target yang ditetapkan.

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sistem informasi yang dibangun dengan target sebesar 32 Sistem telah terealisasi sebesar 22 Sistem atau sebesar 68,75% terealisasi. Indikator Kegiatan Utama (IKU) ini merupakan Kegiatan yang berkaitan dengan Sistem Informasi antara lain: *up dating* Sistem Informasi Manajemen (SIM), workshop pengelolaan SIM, pemeliharaan Server dan penyusunan software. Sesuai dengan arahan Menteri Perhubungan semua kegiatan Sistem Informasi Manajemen harus dikoordinasikan dahulu dengan PUSDATIN Kemenhub, dikarenakan ada beberapa pekerjaan sistem informasi yang tumpang tindih makan pekerjaan tersebut batal untuk dilaksanakan.

Saran untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah untuk dapat meningkatkan tingkat capaian menjadi 100% untuk IKU Jumlah dokumen pedoman yang berkaitan dengan metode/tata cara/acuan penyelenggaraan diklat dan IKU Jumlah sistem informasi yang dibangun sehingga menjadi lebih baik.

- d. Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (*Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum*) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK;

Indikator Kinerja Utama Jumlah Kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dari total target sebesar 79 Dokumen, telah tercapai sebesar 83 Dokumen atau sebesar 105,06%. Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 83 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat adalah 11 dokumen, yaitu :
 - a) Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis LLAJ : 2 Dokumen
 - b) Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis LLASDP : 2 Dokumen
 - c) Penyusunan Kurikulum Diklat Perkeretaapian : 1 Dokumen
 - d) Penyusunan Pengembangan Kurikulum Diklat Awal : 2 Dokumen
 - e) *Review* Kurikulum Diklat Teknis LLAJ : 2 Dokumen
 - f) *Review* Kurikulum Diklat Perkeretaapian : 2 Dokumen

- 2) Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Laut adalah 2 dokumen, yaitu :
 - a) Kurikulum Pendidikan Diploma III *Electro Technical Officer* (ETO) : 1 Dok
 - b) Kurikulum Diklat Peningkatan Kompetensi Kepelautan : 1 Dok

- 3) Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Udara adalah 70 dokumen, yaitu:
 - a) Traction Equipment Tingkat Terampil
 - b) Traction Equipment Tingkat Ahli
 - c) Air Conditioning System Tingkat Trampil
 - d) Air Conditioning System Tingkat Ahli
 - e) Pra Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
 - f) Refreshing Course Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

- g) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB) Maintenance
- h) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 0
- i) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 1
- j) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 2
- k) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 3
- l) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 4
- m) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 5
- n) Approach Control Surveillance
- o) Aeronautical Telecommunication Network (ATN) and ATS Message Handling System (AMHS) Maintenance
- p) AIS / MAP Cartography Specialist
- q) Aerodrome AIS Specialist
- r) NOTAM Specialist
- s) Performance Based Navigation (PBN) Operation For ATC
- t) AdvanceSurface Guidance And Control System (ASMGCS) Maintenance
- u) Monopulse Secondary Surveillance Radar System (MSSR) Maintenance
- v) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) For ATC
- w) Water Pump System Tingkat Terampil
- x) Water Pump System Tingkat Ahli
- y) Alat-alat Besar Tingkat Terampil
- z) Alat-alat Besar Tingkat Ahli
- aa) Airport Emergency Plan
- bb) Airport Security Program

- cc) National Aviation Security
- dd) Fasilitas Sisi Darat Tingkat Terampil
- ee) Fasilitas Sisi Darat Tingkat Ahli
- ff) Fasilitas Sisi Udara Tingkat Terampil
- gg) Fasilitas Sisi Udara Tingkat Ahli
- hh) Teknik Pemadaman Api
- ii) Kepemimpinan Operasi Pemadaman
- jj) Pencegahan Dan Perlindungan Kebakaran
- kk) Hazardous Material Operation
- ll) Fire Investigation
- mm) Fire Safety Management
- nn) Strategi dan Taktik Pemadaman Api
- oo) Uji Mutu Foam
- pp) Hold Baggage Security
- qq) Passenger and Cabin Baggage screening
- rr) Aerodrome Flight Information Service (AFIS)
- ss) Aerodrome Flight Information Service (AFIS) Refreshing Course For ATC
- tt) Airport Planning
- uu) Airport Operation
- vv) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Pertama
- ww) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Muda
- xx) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Utama
- yy) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Madya
- zz) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang AIS
- aaa) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang ATS
- bbb) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang CNS
- ccc) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang PANSOP
- ddd) Instrument Landing System
- eee) Human Factor for Airport Personnel
- fff) Air-Ground / Ground To Ground Radiotelephony (AGGGR)
- ggg) Building Automation System and Fire Alarm System (BAF) Tingkat Terampil

- hhh) Building Automation System and Fire Alarm System (BAF) Tingkat Ahli
- iii) Information System (IFS) Tingkat Terampil
- jjj) Information System (IFS) Tingkat Ahli
- kkk) Aeronautical Communication Checker
- lll) Aeronautical Communication Service Supervisor
- mmm) Aeronautical Information Service (AIS) Checker
- nnn) Aeronautical Information Service (AIS) Supervisor
- ooo) Procedures for Air Navigations Service Aircraft Operational (PANS-OPS)
- ppp) Private Pilot License Flight Training
- qqq) Commercial Pilot License Flight Training
- rrr) Instrument Rating Flight Training.

Indikator Kinerja Utama Jumlah Silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dari total target sebesar 68 Dokumen, telah tercapai sebesar 81 Dokumen atau sebesar 119,12%. Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 81 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat adalah 11 dokumen, yaitu :
 - a) Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis LLAJ : 2 Dokumen
 - b) Penyusunan Kurikulum Diklat Teknis LLASDP : 2 Dokumen
 - c) Penyusunan Kurikulum Diklat Perkeretaapian : 1 Dokumen
 - d) Penyusunan Pengembangan Kurikulum Diklat Awal : 2 Dokumen
 - e) *Review* Kurikulum Diklat Teknis LLAJ : 2 Dokumen
 - f) *Review* Kurikulum Diklat Perkeretaapian : 2 Dokumen

- 2) Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Udara adalah 70 dokumen, yaitu:
 - a) Traction Equipment Tingkat Terampil

- b) Traction Equipment Tingkat Ahli
- c) Air Conditioning System Tingkat Trampil
- d) Air Conditioning System Tingkat Ahli
- e) Pra Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- f) Refreshing Course Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- g) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADSB) Maintenance
- h) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 0
- i) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 1
- j) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 2
- k) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 3
- l) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 4
- m) Air Traffic Flow Management (ATFM) / Collaborative Decision Maker (CDM) level 5
- n) Approach Control Surveillance
- o) Aeronautical Telecommunication Network (ATN) and ATS Message Handling System (AMHS) Maintenance
- p) AIS / MAP Cartography Specialist
- q) Aerodrome AIS Specialist
- r) NOTAM Specialist
- s) Performance Based Navigation (PBN) Operation For ATC
- t) Advance Surface Guidance And Control System (ASMGCS) Maintenance
- u) Monopulse Secondary Surveillance Radar System (MSSR) Maintenance
- v) Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) For ATC

- w) Water Pump System Tingkat Terampil
- x) Water Pump System Tingkat Ahli
- y) Alat-alat Besar Tingkat Terampil
- z) Alat-alat Besar Tingkat Ahli
- aa) Airport Emergency Plan
- bb) Airport Security Program
- cc) National Aviation Security
- dd) Fasilitas Sisi Darat Tingkat Terampil
- ee) Fasilitas Sisi Darat Tingkat Ahli
- ff) Fasilitas Sisi Udara Tingkat Terampil
- gg) Fasilitas Sisi Udara Tingkat Ahli
- hh) Teknik Pemadaman Api
- ii) Kepemimpinan Operasi Pemadaman
- jj) Pencegahan Dan Perlindungan Kebakaran
- kk) Hazardous Material Operation
- ll) Fire Investigation
- mm) Fire Safety Management
- nn) Strategi dan Taktik Pemadaman Api
- oo) Uji Mutu Foam
- pp) Hold Baggage Security
- qq) Passenger and Cabin Baggage screening
- rr) Aerodrome Flight Information Service (AFIS)
- ss) Aerodrome Flight Information Service (AFIS) Refreshing
Course For ATC
- tt) Airport Planning
- uu) Airport Operation
- vv) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Pertama
- ww) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Muda
- xx) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Utama
- yy) Inspector Navigasi Penerbangan Ahli Madya
- zz) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang AIS
- aaa) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang ATS
- bbb) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang CNS
- ccc) Inspector Navigasi Penerbangan Bidang PANSOP

- ddd) Instrument Landing System
- eee) Human Factor for Airport Personnel
- fff) Air-Ground / Ground To Ground Radiotelephony (AGGGR)
- ggg) Building Automation System and Fire Alarm System (BAF) Tingkat Terampil
- hhh) Building Automation System and Fire Alarm System (BAF) Tingkat Ahli
- iii) Information System (IFS) Tingkat Terampil
- jjj) Information System (IFS) Tingkat Ahli
- kkk) Aeronautical Communication Checker
- lll) Aeronautical Communication Service Supervisor
- mmm) Aeronautical Information Service (AIS) Checker
- nnn) Aeronautical Information Service (AIS) Supervisor
- ooo) Procedures for Air Navigations Service Aircraft Operational (PANS-OPS)
- ppp) Private Pilot License Flight Training
- qqq) Commercial Pilot License Flight Training
- rrr) Instrument Rating Flight Training.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dari target sebesar 293 Dokumen telah tercapai sebesar 514 Dokumen atau sebesar 210,66%. Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 514 dokumen dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat dan Perkeretaapian yang berbasis kompetensi adalah 10 dokumen, yaitu:
 - a) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di PPSDM Perhubungan Darat : 6 Dokumen

- b) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di STTD Bekasi : 4 Dokumen
- 2) Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Laut yang berbasis kompetensi adalah 474 dokumen, yaitu:
- a) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di STIP Jakarta : 3 Dokumen;
 - b) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di BP3IP Jakarta : 3 Dokumen;
 - c) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di PIP Semarang : 3 Dokumen;
 - d) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di PIP Makassar : 3 Dokumen;
 - e) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di BP2IP Malahayati Aceh Besar : 302 Dokumen;
 - f) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di BP2IP Tangerang : 97 Dokumen;
 - g) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di BP2IP Sorong : 63 Dokumen.
- 3) Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Udara yang berbasis kompetensi adalah 28 dokumen, yaitu sebagai berikut:
- a) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di PPSDM Perhubungan Udara : 2 Dokumen;
 - b) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di STPI Curug : 13 Dokumen;
 - c) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di ATKP Medan : 6 Dokumen;
 - d) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di ATKP Makassar : 6 Dokumen;
 - e) Penyusunan modul/ bahan ajar Diklat di BP3 Jayapura : 3 Dokumen.

- 4) Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi adalah 2 dokumen

Pada tahun 2015 ini, IKU Jumlah modul/bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi telah mencapai target.

Bila dibandingkan pada tahun 2014, pada tahun 2015 ini mengalami kenaikan pencapaian sasaran, hal ini dikarenakan adanya pengembangan kurikulum/silabus dan modul/bahan ajar untuk diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang berbasis kompetensi setiap tahunnya untuk mengikuti perkembangan jaman.

Saran untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah untuk dapat dipertahankan capaian 100% untuk IKU Jumlah Silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi dan IKU Jumlah Silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi serta diharapkan dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik.

- e. Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU);

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan target sebesar 12 Lembaga dan hanya terealisasi sebanyak 7 lembaga. Lembaga yang diusulkan untuk menjadi BLU adalah STTD Bekasi, STPI Curug,

ATKP Medan, ATKP Makassar, API Madiun, BP2IP Tangerang, BP2IP Barombong, BP2IP Sorong, BP2IP Malahayati Aceh Besar, BP2TD Palembang, BP2TD Bali dan BP3 Jayapura.

Pada tahun 2015 sebanyak 7 lembaga yang disetujui untuk menjadi Satker BLU oleh Kementerian Keuangan yaitu:

- 1) B2IP Barombong sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1267/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Barombong Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 2) STPI Curug sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1268/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 3) ATKP Makassar sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1269/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 4) BP2IP Tangerang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1270/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Tangerang Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5) BP2IP Malahayati Aceh sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1271/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6) ATKP Medan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1330/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Medan Pada Kementerian

Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 7) STTD Bekasi sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1334/KMK.05/2015 Tentang Penetapan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Bekasi Pada Kementerian Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Untuk 9 (Sembilan) Satker lainnya saat ini masih menunggu proses persetujuan dari Kementerian Keuangan terkait dengan menjadi satker Badan Layanan Umum.

- f. Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, *International Recognition* Serta *Public Private Partnership*;

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi ini merupakan Jumlah dokumen kerjasama antara lembaga diklat dengan pihak ketiga. Dari jumlah target sebanyak 38 Dokumen, Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah melampaui target tersebut yaitu sebesar 105 Dokumen (276,32%).

Berikut daftar Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan dengan pihak ketiga pada tahun 2015:

- 1) Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Darat dan perkeretaapian adalah 2 dokumen;
- 2) Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Laut adalah 56 dokumen;
 - a) Kerjasama STIP Jakarta dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 12 Dokumen;

- b) Kerjasama BP3IP dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 5 Dokumen;
 - c) Kerjasama PIP Semarang dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 9 Dokumen;
 - d) Kerjasama PP Surabaya dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 10 Dokumen;
 - e) Kerjasama BP2IP Malahayati Aceh Besar dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 6 Dokumen;
 - f) Kerjasama BP2IP Barombong dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 4 Dokumen;
 - g) Kerjasama BP2IP Sorong dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 10 Dokumen.
- 3) Jumlah dokumen kerjasama Diklat Transportasi Udara adalah 45 dokumen;
- a) Kerjasama PPSDM Perhubungan Udara dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 2 Dokumen;
 - b) Kerjasama STPI Curug dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 3 Dokumen;
 - c) Kerjasama ATKP Medan dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 15 Dokumen;
 - d) Kerjasama ATKP Surabaya dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 23 Dokumen;
 - e) Kerjasama ATKP Makassar dengan lembaga pemerintah dan /swasta nasional atau asing sebanyak 2 Dokumen.
- 4) Jumlah dokumen kerjasama Diklat Aparatur Perhubungan adalah 1 dokumen.
- 5) Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing di bidang diklat transportasi adalah 1 dokumen.

Bila dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kerjasama yang baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Perhubungan ini semoga tetap terjalin secara berkesinambungan untuk tahun kedepannya.

Saran untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah dapat dipertahankan capaian di atas 100% untuk sasaran strategis tersebut dan dapat ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik.

- g. Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan;

Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Nilai AKIP BPSDM Perhubungan merupakan nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan periode/tahun sebelumnya. Nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan untuk tahun 2015 adalah sebesar 90,46. Bila dibandingkan dengan Nilai AKIP pada tahun 2013, Badan Pengembangan SDM Perhubungan mengalami penurunan dari nilai AKIP sebesar 91,75 menjadi 90,46 atau turun sebesar 1,29.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 dan Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Perhubungan Tahun 2015 memperoleh nilai sebesar 90,46, dengan kategori AA.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengembangan SDM Perhubungan Tahun 2015 oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, Badan Pengembangan SDM Perhubungan memperoleh nilai sebesar 90,75 yang terdiri dari 5 (lima) bagian penilaian yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Skor hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja sebesar 33,41% dari skor maksimal 35%. Adapun beberapa kriteria yang belum terpenuhi adalah :

- a. Beberapa realisasi kegiatan yang merupakan cara mencapai sasaran belum dimasukkan sebagai target kegiatan dalam Perencanaan Kinerja Tahunan;
- b. Pencapaian kinerja belum dijadikan dasar untuk memberikan *reward and punishment*;
- c. Monitoring atas penerapan *reward and punishment* belum dilakukan.

2. Pengukuran Kinerja

Skor hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja sebesar 19,25% dari skor maksimal 20%. Kriteria yang belum terpenuhi adalah capaian IKU belum dijadikan dasar *reward atau punishment*.

3. Pelaporan Kinerja

Skor hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja sebesar 13,34% dari skor maksimal 15%. Kriteria yang belum terpenuhi adalah uraian capaian kinerja yang disajikan belum memuat semua kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja.

4. Evaluasi Kinerja

Skor hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Kinerja sebesar 7,67% dari skor maksimal 10%. Kriteria yang belum terpenuhi adalah belum terdapat bukti dan informasi yang cukup memadai atas tindak lanjut rekomendasi.

5. Capaian Kinerja

Skor hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja sebesar 16,80% dari skor maksimal 20%. Adapun beberapa kriteria yang belum terpenuhi adalah :

- a. Target dan Capaian Sasaran Strategis belum tercapai secara keseluruhan;
- b. Pengumpulan data kinerja belum terintegrasikan dalam sebuah *system* manajemen yang utuh sehingga belum cukup akurat dan dapat diandalkan.

Rekomendasi atas hasil evaluasi tahun lalu masih dalam proses tindak lanjut adalah pengumpulan data kinerja belum seluruhnya terintegrasikan dalam sebuah sistem manajemen yang utuh karena masih terdapat Eselon III Unit Pelaksana Teknis Mandiri dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum selaras dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Perencanaan Kinerja (PK) sehingga perlu dilakukan pembinaan yang intensif oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Hasil evaluasi AKIP tahun 2015 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan, BPSDM Perhubungan memperoleh nilai sebesar 90,46 dengan rekomendasi antara lain :

- a. Melakukan revisi terhadap Perencanaan Kinerja Tahunan sehubungan terdapat penambahan kegiatan sebagai cara mencapai sasaran;
- b. Pencapaian IKU supaya dijadikan dasar pemberian *reward and punishment*;

- c. Pelaporan kinerja supaya sepenuhnya menyajikan informasi capaian kinerja yang memuat semua kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja;
- d. Pemenuhan dan kualitas evaluasi yang telah dilakukan supaya terdapat bukti yang cukup atas tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi;
- e. Pengumpulan data kinerja supaya terintegrasikan dalam sebuah sistem manajemen yang utuh sehingga akurat dan dapat diandalkan.

Nilai AKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan Pada Tahun 2015 ini merupakan nilai AKIP tertinggi nomor 3 (tiga) dengan kategori AA bila dibandingkan dengan nilai AKIP Unit Eselon I lingkungan Kementerian Perhubungan.

Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan adalah sebesar 83,19% dari target penyerapan anggaran sebesar 89,25%. Tingkat penyerapan anggaran Badan Pengembangan SDM Perhubungan pada tahun 2015 sebesar Rp. 3.770.739.390.647,- (83,19%) dari total Pagu sebesar Rp. 4.532.882.248.000,-

Realisasi Indikator Kegiatan Utama (IKU) Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 13.034.924.807.142,- dengan rincian sebagai berikut ini:

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
117111	Barang Konsumsi	3.916.846.350	0	3.916.846.350
117112	Amunisi	0	0	0
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	649.835.696	0	649.835.696
117114	Suku Cadang	10.406.775.910	0	10.406.775.910

AKUN NERACA		JUMLAH		
KODE	URAIAN	NILAI BMN	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada	0	0	0
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke	1.804.000	0	1.804.000
117131	Bahan Baku	18.848.337.895	0	18.848.337.895
117191	Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga - jaga	5.000	0	5.000
117199	Persediaan Lainnya	1.580.059.622	0	1.580.059.622
131111	Tanah	1.831.489.923.463	0	1.831.489.923.463
132111	Peralatan dan Mesin	5.848.288.640.095	2.826.823.699.373	3.021.464.940.722
133111	Gedung dan Bangunan	4.188.528.021.638	336.428.908.813	3.852.099.112.825
134111	Jalan dan Jembatan	136.576.786.652	53.689.607.287	82.887.179.365
134112	Irigasi	68.012.325.914	11.744.459.256	56.267.866.658
134113	Jaringan	127.731.597.223	29.503.069.323	98.228.527.900
135111	Aset Tetap dalam Renovasi	5.903.567.418	199.900.000	5.703.667.418
135121	Aset Tetap Lainnya	72.477.851.990	13.039.973.071	59.437.878.919
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	400.817.032.259	0	400.817.032.259
162121	Hak Cipta	181.447.000	0	181.447.000
162151	Software	123.875.379.759	0	123.875.379.759
162161	Lisensi	3.911.555.980	0	3.911.555.980
162171	Hasil Kajian/Penelitian	79.627.821.862	0	79.627.821.862
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	99.762.804.809	0	99.762.804.809
162311	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	255.232.000	0	255.232.000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	12.081.154.607	6.571.774.628	5.509.379.979
J U M L A H		13.034.924.807.142	3.278.001.391.751	9.756.923.415.391

Sumber Data: Satker/UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Tercapainya target Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai Aset Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar 100,65% dikarenakan kegiatan kontraktual yang melebihi target sebesar 80% dari nilai Belanja Modal.

Saran untuk Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah dengan mempertahankan nilai AKIP sehingga tahun berikutnya dapat lebih ditingkatkan. Selain itu agar penyerapan anggaran dapat lebih maksimal dan lebih meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait sehingga capaian dapat ditingkatkan secara maksimal.

- h. Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional;

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan merupakan Jumlah Draft peraturan Menteri Perhubungan yang telah selesai disusun yang ditargetkan akan dikirim kepada Biro Hukum, jumlah SK Kepala BPSDMP yang ditargetkan akan diterbitkan. Dari target sebesar 15 Peraturan, telah terealisasi sebesar 35 Peraturan atau dapat dikatakan telah melampaui target sebesar 233,33%.

Berikut daftar Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi yang telah dibuat:

NO.	PERATURAN	NOMOR
1.	Keputusan Kepala BPSDMP tentang Tenaga Pendidik di Bidang Pelayaran Pada PIP Makassar Tahun Anggaran 2015	SK.114 /BPSDMP-2015
2.	Keputusan Kepala BPSDMP tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Alih Status penggunaan Helikopter BO-105 Dari Kementerian Kehutanan Ke Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia	SK. 11/BPSDMP-2015
3.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Tim Evaluasi Diklat Jurusan Penerbang STPI Tahun 2015	SK.651/BPSDMP-2015
4.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Kepala Badan	SK.112/BPSDMP-2015

NO.	PERATURAN	NOMOR
	Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK.53/BPSDMP-2015 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan BLU di Lingkungan BPSDMP	
5.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan tentang Pembentukan Tim Independen Pengawas Mutu Diklat Transportasi	SK.79/BPSDMP-2015
6.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Tim Pemantauan Penetapan Kinerja UPT Badan Pengembangan SDM Perhubungan	SK.45/BPSDMP-2015
7.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Tingkat Wilayah (UAPPB-W) BPSDMP Tahun Anggaran. 2015.	SK.652/BPSDMP-2015
8.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Tanda Kecakapan Keahlian Penerbang dan Instruktur Penerbang di Lingkungan BPSDMP	SK.699/BPSDMP-2015
9.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Pembentukan Tim Kajian Pengusulan Penetapan UPT di Lingkungan BPSDMP Sebagai BLU.	SK.879/BPSDMP-2015
10.	Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Tim Monitoring Angkutan Lebaran Terpadu di Lingkungan BPSDMP.	SK.757/BPSDMP-2015
11.	Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan tentang Penyempurnaan Peraturan Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Nomor PK.04/BPSDMP-2014 tentang Kurikulum dan Silabus Diklat Peningkatan Kompetensi dan Teknis lainnya di Bidang Penerbangan	PK.06/BPSDMP-2015
12.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.465/Phb-2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP2PNB) Jayapura.	SK.895/Phb-2015

NO.	PERATURAN	NOMOR
13.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.463/Phb-2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang.	SK.898/Phb-2015
14.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.466/Phb-2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP2PNB) Palembang.	SK.896/Phb-2015
15.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BPSDMP	SK. 897/Phb-2015
16.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) PPSDMAP	SK.01/Phb-2015
17.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.01/Phb-2015 Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) PPSDMAP	SK. 894/Phb-2015
18.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.462/Phb-2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BP2IP Aceh	SK. 686/Phb-2015
19.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.464/Phb-2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BP2TD Palembang	SK. 688/Phb-2015
20.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) API Madiun	SK. 687/Phb-2015
21.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BP2IP Aceh	SK. 462/Phb-2015

NO.	PERATURAN	NOMOR
22.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2208/BPSDMP-2013 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BP3IP Jakarta	SK.02/Phb-2015
23.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP STIP	SK.657/Phb-2015
24.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP.205 tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) BP2TD Bali	SK.04/Phb-2015
25.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP ATKP Surabaya	SK.05/Phb-2015
26.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP Poltekpel Surabaya	SK.08/Phb-2015
27.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP STPI	SK. 122/Phb-2015
28.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. SK.122/Phb-2015 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) STPI	SK. 389/Phb-2015
29.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP BP2TD Palembang	SK. 464/Phb-2015
30.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.134 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) ATKP Medan	SK.06/Phb-2015
31.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP ATKP Medan	SK. 387/Phb-2015
32.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP ATKP Medan	SK. 387/Phb-2015
33.	Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pembentukan ULP BP2PNB Jayapura	SK. 465/Phb-2015
34.	Keputusan KPA Sekretariat BPSDM Perhubungan tentang Pemberhentian dengan Hormat	SK.904/BPSDMP-2015

NO.	PERATURAN	NOMOR
	Pengelola Anggaran Tahun 2015 dan Penunjukkan/Pengangkatan Pengelola Anggaran tahun 2016 pada Sekretariat BPSDM Perhubungan	
35.	Keputusan KPA Sekretariat BPSDM Perhubungan tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Sekretariat BPSDM Perhubungan Tahun Anggaran 2016	SK.966/BPSDMP-2015

Sumber Data: Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

- i. Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional;

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir dengan target sebesar 845 Unit telah terealisasi sebesar 1.113 Unit atau dapat dikatakan tingkat capaiannya sebesar 131,72%.

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan dengan target sebesar 253.144 M2 telah terealisasi sebesar 254.521,22 M2 atau dapat dikatakan tingkat capaiannya sebesar 100,54%.

- j. Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.

Untuk Indikator Kegiatan Utama (IKU) Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika ini merupakan Jumlah Tenaga Kependidikan yang diperkirakan pada tahun anggaran bersangkutan. Target IKU tersebut sebesar 3.544 Orang telah terealisasi sebesar 2.568 Orang atau tingkat capaiannya sebesar 72,46%. Capaian indikator tersebut tidak sesuai dengan target

dikarenakan tidak adanya formasi penerimaan PNS dan adanya mutasi pegawai.

Bila dibandingkan pada tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2015 ini mengalami peningkatan jumlah tenaga kependidikan tetapi dari segi tingkat pencapaian tidak mencapai target yaitu hanya sebesar 72,46%.

Dari total 2.568 orang tenaga kependidikan, terdapat 521 orang dosen tetap, 117 orang Instruktur tetap dan 22 orang Widyaiswara yang telah memiliki sertifikat jabatan fungsional khusus. Karena masih kurangnya tenaga pendidik, Badan Pengembangan SDM Perhubungan masih memerlukan Dosen Luar Biasa/Dosen Tidak Tetap dan Instruktur Tidak Tetap. Jumlah Dosen Luar Biasa/Dosen Tidak Tetap sebanyak 1.012 orang dan Instruktur Tidak Tetap 942 orang.

Berikut rincian jumlah Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika berdasarkan unit kerja:

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
1	Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan	89
2	Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Bekasi	173
3	Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug	376
4	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta	241
5	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta	98
6	Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang	201
7	Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar	122
8	Politeknik Pelayaran (POLTEKPEL) Surabaya	110
9	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal	95
10	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan	96
11	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Surabaya	123

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH
12	Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makassar	97
13	Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun	37
14	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi darat (BP2TD) Palembang	71
15	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi darat (BP2TD) Bali	70
16	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Tangerang	106
17	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Barombong	96
18	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	31
19	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Malahayati Aceh Besar	37
20	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Padang Pariaman	29
21	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran (BP3) Minahasa Selatan	27
22	Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) Jakarta	47
23	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbang (BP3) Banyuwangi	39
24	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang	47
25	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Jayapura	41
26	Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Curug	40
27	Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Karakter (BP3K) SDM Transportasi	29
JUMLAH		2.568

Sumber Data: Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan

Rincian berbagai permasalahan tersebut untuk tiap matra sumber daya manusia perhubungan antara lain:

a. Pendidikan dan pelatihan transportasi darat

Permasalahan yang dihadapi oleh Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat dalam rangka pengembangan SDM di bidang Perhubungan Darat dan Perkeretaapian adalah sebagai berikut:

1) Lulusan Diklat Belum Dimanfaatkan Secara Optimal

Mekanisme promosi, rotasi dan mutasi jabatan belum berjalan optimal sehingga banyak lulusan diklat yang belum mendapatkan posisi sesuai dengan keahlian dan kompetensinya terutama untuk Diklat Teknis dan belum adanya aturan kualifikasi kompetensi yang jelas yang harus dipenuhi untuk menunjang tugas dan fungsi, menyebabkan jumlah SDM aparatur daerah yang memiliki kompetensi transportasi darat masih sangat kecil.

2) Diklat-Diklat Teknis Belum Seluruhnya Aplikatif

Dari keseluruhan pendidikan dan pelatihan teknis dilingkungan Pusdiklat Perhubungan Darat terdapat beberapa diklat yang tidak sepenuhnya aplikatif. Beberapa sebab yang diidentifikasi menyebabkan hal ini adalah sebagai berikut:

- a) Perbedaan yang cukup besar antara kondisi yang digunakan sebagai bahan ajaran dalam pendidikan dan pelatihan teknis dengan yang ada di daerah peserta diklat.
- b) Perbedaan kemampuan peserta yang mengikuti diklat dengan kemampuan dasar yang diharapkan dalam mengikuti suatu diklat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. misalnya : pegawai terlalu lama tidak mengikuti diklat sehingga tidak mampu mengikuti diklat dengan baik.
- c) Materi diklat akan membutuhkan dana yang cukup besar bagi daerah untuk mengimplementasikan di lapangan. Misalnya diklat *Area Traffic Control System (ATCS)*.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyelenggaraan Diklat Teknis yang berada di lingkungan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat masih belum menunjukkan kondisi yang optimal. Beberapa indikasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

- a) Belum tersusunnya seluruh kompetensi tenaga teknis sub sektor Perhubungan Darat sehingga pola diklat yang dibuat masih banyak yang berorientasi kepada *knowledge* belum dilengkapi dengan materi *skill* yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan tugas.
- b) Belum adanya sinkronisasi pola antara pola Diklat Teknis yang dimiliki oleh Departemen Perhubungan dengan pola pembinaan pegawai yang berada di daerah. Perbedaan struktur organisasi pada beberapa daerah otonom menyebabkan kompetensi yang dibutuhkan beberapa penyesuaian yang diperlukan.
- c) Kapasitas dan kualitas prasarana, sarana, bahan ajaran, widyaiswara, serta dana yang ada belum berjalan secara optimal. Masing-masing unsur membutuhkan peningkatan dan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi perubahan yang semakin cepat terutama dalam bidang ilmu. pengetahuan. teknologi. informasi. serta kebutuhan pasar.
- d) Penyelenggaraan diklat masih banyak mengandalkan pembiayaan dan program dari organisasi induk masing-masing. Dampaknya adalah bahwa perubahan cepat yang terjadi pada tingkat daerah tidak dapat dengan segera disesuaikan.

3) Bahan dan Alat Pengajaran yang Belum Memadai

Bahan dan alat pengajaran merupakan salah satu unsur yang menentukan keberhasilan diklat. Untuk mencapai hasil diklat sesuai dengan tujuan instruksional yang ditetapkan. maka bahan dan alat pelajaran diperlukan untuk memenuhi dan membantu proses pendidikan dan pelatihan antara pengajar dengan peserta diklat. Secara umum kurikulum dan silabi diklat, baik diklat awal maupun penataran perlu ditinjau ulang menyesuaikan perkembangan kelembagaan, teknologi dan globalisasi.

4) Belum Tersusunnya Program Unggulan Setiap UPT Diklat

Pembangunan dan penyediaan sarana diklat pada UPT Balai Diklat Transportasi Darat Bali dan Tegal selama ini dalam pengadaan sarana diklat selalu mempunyai jenis yang sama sehingga masing-masing UPT tidak mempunyai karakteristik, ciri khas dan kelebihannya masing-masing. Alangkah baiknya jika Sarana yang dimiliki UPT saling melengkapi dan saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

5) Kurang Optimalnya Peran dan Fungsi Tenaga Pengajar

Mengingat bahwa sebagian besar para pengajar adalah para pejabat dan tenaga profesional dari berbagai instansi dan organisasi yang mempunyai tugas utama sebagai tenaga birokrasi internal, praktisi dan akademisi lembaga eksternal, maka tenaga pengajar/pendidik yang khusus mengembangkan bahan ajar, mengembangkan praktek/simulasi alat peraga dan alat peraktek diklat belum tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka harus dilakukan beberapa perubahan untuk dapat meningkatkan minat para peserta dalam mengikuti diklat yang akan diselenggarakan UPT Darat, diantaranya dengan:

- 1) Sosialisasi lebih awal kepada dinas-dinas perhubungan dan instansi terkait mengenai program diklat yang akan dilaksanakan.
- 2) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi baik dengan Pusdiklat Perhubungan Darat maupun Badan Diklat Perhubungan selaku pembina diklat, disamping dengan instansi-instansi terkait serta institusi-institusi asal peserta diklat guna memenuhi jumlah peserta diklat yang direncanakan.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar/dosen pada setiap tahunnya.

b. Pendidikan dan pelatihan transportasi Laut

Pemetaan permasalahan Pusdiklat Perhubungan Laut dalam rangka pengembangan diklat kepelautan sesuai amanat UU No. 17 / 2008 tentang Pelayaran. meliputi:

- 1) Kelembagaan;
- 2) Jalur Jenis dan Jenjang Diklat;
- 3) Kurikulum dan Metode Diklat;
- 4) Sarana dan Prasarana Diklat;
- 5) Tenaga Pendidik dan Pelatih;
- 6) Peserta Diklat;
- 7) Standarisasi Diklat;
- 8) Pembiayaan Diklat;
- 9) Pengendalian dan Pengawasan Diklat;
- 10) Hak dan Kewajiban Pendidikan dan Pelatihan Diklat.

c. Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Udara

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Diklat Pembentukan/ awal dan Diklat Teknis/Fungsional pada beberapa UPT Perhubungan Udara adalah:

- 1) Kurangnya lahan untuk pengembangan fasilitas guna menunjang kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- 2) Kekurangan tenaga ahli yang berkompetensi di bidang penerbangan dikarenakan sebagian besar lulusan diklat pembentukan dari UPT tersebut memilih untuk bekerja di perusahaan asing.
- 3) Kurangnya dosen tetap di instansi masing-masing. Banyaknya tenaga pengajar yang tidak memiliki status instruktur tetap karena belum adanya Surat Keputusan atau jabatan fungsional instruktur.

d. Pusdiklat Aparatur Perhubungan

Permasalahan pelaksanaan program/kegiatan yang dananya bersumber dari DIPA Pusdiklat Aparatur Perhubungan Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah calon peserta prajabatan lebih banyak dari yang direncanakan sehingga di perlukan Revisi DIPA Pusdiklat Aparatur Perhubungan Th 2009, yaitu dari beberapa Diklat Teknis menjadi Diklat Prajabatan.
- 2) Revisi Diklat Perencanaan menjadi Diklat prajabatan dan Diklat Barang dan Jasa.
- 3) Peserta Diklat Khususnya diklat teknis & fungsional banyak quota peserta tidak terisi. Sehingga menyebabkan anggaran tidak terserap seluruhnya.
- 4) Jumlah Peserta Diklat prajabatan yang tidak konsisten.
- 5) Jumlah peserta diklat teknis & fungsional yang tidak terpenuhi.
- 6) Kekurangan Tenaga Widyaiswara yang tetap Pada Pusdiklat Aparatur Perhubungan.

e. Sekretariat Badan Diklat Perhubungan

Keberadaan Sekretariat Badan Diklat Perhubungan sebagai motor penggerak bagi unit kerja Diklat Perhubungan dan sebagai unit kerja yang merupakan unsur pembantu pimpinan yang melaksanakan tugas pembinaan secara teknis administratif di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan, maka Sekretariat Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan mempunyai tugas utama yaitu melaksanakan pembinaan administratif terhadap semua unit kerja serta melaksanakan berbagai program pendidikan dan pelatihan aparatur guna mempersiapkan dan meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas operasional bidang Perhubungan.

Banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Sekretariat Badan Diklat Perhubungan serta masih kurangnya peralatan kerja mengakibatkan adanya beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga capaian sasaran kegiatan selama kurun waktu 5 tahun masih dirasakan belum maksimal, hal ini disebabkan karena terbatasnya Sumber Daya Manusia yang

kompeten dan komposisi pegawai yang belum ideal yang ada pada Sekretariat Badan Diklat Perhubungan baik dari segi kualitas dan kuantitas serta masih sering terjadi tumpang tindih tupoksi yang mengakibatkan pelaksanaan beberapa kegiatan menjadi terkendala dan mempengaruhi kegiatan lainnya. Belum optimalnya kinerja tersebut juga disebabkan beberapa faktor luar seperti masih lemahnya koordinasi dan komunikasi dengan UPT dan pihak lain yang juga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan.

Dalam menyingkapi berbagai permasalahan selama melaksanakan berbagai program dan kebijakan di BPSDM Perhubungan, perlu dilakukan tindak lanjut penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi.

- Penambahan SDM tenaga pendidik (dosen, instruktur, dan widyaiswara) dan kependidikan yang sesuai dengan jumlah dan standar kompetensi yang diharapkan.
- Penambahan dan pembaharuan sarana dan prasarana untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Pembuatan sistem informasi kepegawaian dan diklat yang terpusat dan terintegrasi antar UPT di bawah BPSDM Perhubungan untuk memudahkan koordinasi antar UPT dan antar bagian.
- Pembuatan rencana induk pengembangan Sumber Daya Manusia transportasi untuk merencanakan dan mensinergiskan program pengembangan SDM transportasi dalam jangka panjang melalui *Grand Design* BPSDM Perhubungan Tahun 2015-2034.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pagu akhir Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015 sebesar **Rp. 4.532.882.248.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Persumber dana:
 - a. RM : Rp. 3.909.872.706.000
 - b. PNBP : Rp. 191.695.006.000
 - c. BLU : Rp. 431.314.536.000
 - d. PHLN : Rp. -

- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 348.388.168.000
 - b. Belanja Barang : Rp. 2.172.687.952.000
 - c. Belanja Modal : Rp. 2.011.806.128.000
 - RM : Rp. 2.011.806.128.000
 - PHLN : Rp. -

Realisasi penyerapan DIPA T.A 2015 posisi 31 Desember 2015 sebesar **Rp. 3.770.739.390.647,-** dari total PAGU Badan Pengembangan SDM Perhubungan **Rp. 4.532.882.248.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Keuangan
Belanja Pegawai	348.388.168.000	280.506.597.242	80,52
Belanja Barang	2.173.587.952.000	1.710.263.001.017	78,68
Belanja Modal	2.010.906.128.000	1.779.969.792.388	88,52
Total	4.532.882.248.000	3.770.739.390.647	83,19

Berdasarkan penyerapan anggaran tahun 2015 dapat ditentukan tingkat penyerapan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$TP = \frac{\sum_{j=1}^n RA \text{ bulan ke } - j}{\sum_{j=1}^n RPD \text{ bulan ke } - j} \times 100\%$$

Keterangan:

- TP : Tingkat Penyerapan
- RPD bulan ke-*j* : Rencana Penarikan Dana bulan ke-*j*
- RA bulan ke-*j* : Realisasi Anggaran bulan ke-*j*

n : jumlah bulan

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil penghitungan seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini :

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	TK (Tingkat Penyerapan)
1	JANUARI	38.502.111.000	38.502.111.000	16.497.763.262	42,85%
2	FEBRUARI	98.318.290.000	136.820.401.000	77.747.859.496	56,82%
3	MARET	160.141.064.000	296.961.465.000	186.028.247.413	62,64%
4	APRIL	189.249.198.000	486.210.663.000	335.812.167.156	69,07%
5	MEI	207.805.449.000	694.016.112.000	503.371.954.554	72,53%
6	JUNI	275.100.857.000	969.116.969.000	715.670.764.552	73,85%
7	JULI	381.873.762.000	1.350.990.731.000	933.360.413.959	69,09%
8	AGUSTUS	384.076.638.000	1.735.067.369.000	1.183.784.111.696	68,23%
9	SEPTEMBER	478.811.194.000	2.213.878.563.000	1.438.398.063.409	64,97%
10	OKTOBER	631.403.592.000	2.845.282.155.000	1.768.634.499.397	62,16%
11	NOVEMBER	739.349.918.000	3.584.632.073.000	2.446.192.245.594	68,24%
12	DESEMBER	948.250.175.000	4.532.882.248.000	3.770.739.390.647	83,19%

Dari pengalokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^n RA \text{ bulan ke-}j}{\sum_{j=1}^n RPD \text{ bulan ke-}j} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RPD bulan ke- j : Rencana Penarikan Dana bulan ke- j

RA bulan ke- j : Realisasi Anggaran bulan ke- j

n : jumlah bulan

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{42,85\% + 56,82\% + 62,64\% + \dots + 62,16\% + 68,24\% + 83,19\%}{12}$$

$$K = 66,14\%$$

Jadi, nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2015 sebesar **66,14%**.

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Rumus Efisiensi:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke-i}/RVK_{ke-i}}{PAK_{ke-i}/TVK_{ke-i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi anggaran per keluaran
- RVK : Realisasi volume keluaran
- PAK : Pagu anggaran per keluaran
- TVK : Target Volume keluaran
- n : Jumlah jenis keluaran

Rumus Nilai Efisiensi:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
- E : Efisiensi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RAK/RVK (A)	PAK/TVK (B)	A/B	(1-A/B) x 100%	CAPAIAN	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1	Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	292.693	463.061	158,21	1.083.138.823.000	825.750.385.303	1.783.243,21	3.700.596,95	0,48	51,81	76,24
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	281.204	448.901	159,64							
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis	3	Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang	Dokumen	83	28	33,73	7.480.690.000	5.678.452.580	202.801.877,86	90.128.795,18	2,25	-125,01	75,91

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RAK/RVK (A)	PAK/TVK (B)	A/B	(1-A/B) x 100%	CAPAIAN
	Teknologi Informasi	berbasis teknologi informasi.											
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	32	22	68,75	19.471.895.000	16.037.024.614	728.955.664,27	608.496.718,75	1,20	-19,80	82,36
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	79	83	105,06	24.888.454.000	19.176.508.566	84.851.807,81	190.960.005,12	0,44	55,57	77,05
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	68	81	119,12							
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur	Dokumen	244	514	210,66							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RAK/RVK (A)	PAK/TVK (B)	A/B	(1-A/B) x 100%	CAPAIAN	
		Perhubungan yang berbasis kompetensi.												
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8	Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	12	7	58,33							
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9	Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	38	105	276,32	1.960.439.000	791.250.769	7.535.721,61	51.590.500,00	0,15	85,39	40,36

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RAK/RVK (A)	PAK/TVK (B)	A/B	(1-A/B) x 100%	CAPAIAN	
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	87,00	90	103,98							
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	89,25	83	93,21							
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	12.951.198.626.401	9.756.923.415.391	75,34							
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	15	35	233,33	3.447.669.000	2.167.464.409	61.927.554,54	229.844.600,00	0,27	73,06	62,87
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	845	1.113	131,72	934.769.567.000	769.320.955.184	691.213.796,21	1.106.236.173,96	0,62	37,52	82,30

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RAK/RVK (A)	PAK/TVK (B)	A/B	(1-A/B) x 100%	CAPAIAN	
	Standar Nasional dan/atau Internasional.	15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	253.143,70	254.521	100,54	930.286.501.000	864.158.667.729	3.395.232,30	3.674.934,44	0,92	7,61	92,89
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.544	2.568	72,46							

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui Efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada tahun 2015 sebesar 73,75% dan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 234,37%

6. Kontribusi Terhadap Capaian IKU Kementerian Perhubungan

SASARAN STRATEGIS (SS)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET PK	REALISASI PK	%	PAGU (Rp.)	REALISASI		Capaian (%)		
							Rp.	Fisik (%)			
b.	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2.	Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	281.204	448.901	159,64	4.532.882.248.000	3.770.739.390.647	100,00	83,19

Badan Pengembangan SDM Perhubungan hanya berkontribusi 1 buah IKU terhadap capaian IKU Kementerian Perhubungan, yaitu IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan yang mana merupakan bagian dari Sasaran Strategis Peningkatan kualitas SDM di bidang transportasi dan Sasaran Perhubungan Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi. Capaian IKU tersebut telah melebihi dari yang ditargetkan, yaitu dari sebesar 281.204 orang yang ditargetkan, sebanyak 448.901 orang (159,64%) realisasinya.

Dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.532.882.248.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.770.739.390.647,- (83,19%). Hal ini cukup baik, karena dengan hanya tingkat realisasi sebesar 83,19% tetapi IKU Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan telah melampaui target sebesar 159,64%.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Peningkatan Jumlah Lulusan SDM Transportasi Bersertifikat secara keseluruhan telah melebihi target, yaitu sebesar 448.901 orang dari target sebesar 281.204 orang atau sebesar 159,64% dari target Perjanjian Kinerja (PK). Hal ini dikarenakan:

- a. Pencapaian target IKU SDM Aparatur Kemenhub (termasuk berasal Dishub) yang ditargetkan sebesar 14.183 orang hanya tercapai 12.052 orang (84,97%). Hal ini dikarenakan beberapa permasalahan
 - Adanya Self Blocking dan pemotongan anggaran perjalanan dinas oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga untuk menyebabkan beberapa kegiatan diklat tidak dapat diselenggarakan dikarenakan perjalanan dinas untuk peserta tidak mencukupi;
 - Adanya beberapa jenis diklat yang sama yang diselenggarakan oleh Lembaga atau Kementerian lainnya sehingga para peserta diklat lebih memilih lokasi terdekat;
 - Adanya beberapa peserta diklat tidak mendapatkan ijin/rekomendasi dari pimpinan terkait untuk mengikuti diklat dimaksud hal ini dikarenakan keterkaitan dengan pekerjaan di kantor;
 - Adanya beberapa diklat tidak terlaksana dikarenakan kendala teknis, seperti restrukturisasi organisasi di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup sehingga diklat Perubahan Iklim tidak terlaksana, diklat Pranata humas (pengiriman) tidak dilaksanakan karena instansi pembina teknis yaitu Kementerian Komunikasi dan informasi belum menerapkan penerimaan peserta dengan pola PNBK.

- b. Pencapaian target IKU SDM yang berasal Masyarakat telah melampaui batas, dari target 267.021 orang telah tercapai sebesar 436.849 orang (163,60%). Peningkatan pencapaian target secara signifikan ini terjadi pada SDM Transportasi Laut. Hal ini

dikarenakan adanya peraturan yang termuat dalam STCW 2010 Manila, bahwa setiap pelaut pemegang sertifikat STCW 1978 Amandemen 1995 harus disesuaikan berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010 dari tingkat dasar sampai tingkat I sebelum batas waktu tanggal 1 Januari 2017, selain itu untuk Pelatihan Ketrampilan Khusus Pelaut (PKKP) guna memperoleh sertifikat keterampilan sesuai konvensi internasional IMO-SCTW 1978 dan amandemennya. Sehingga permintaan diklat dari masyarakat sangat tinggi untuk diklat dimaksud.

B. REALISASI ANGGARAN BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN TAHUN 2015

1. DIPA TAHUN 2015

Pagu anggaran awal TA. 2015

Total Alokasi dana dalam DIPA TA. 2015 Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar **Rp. 3.973.685.231.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Persumber dana:

a. RM	:	Rp.	3.481.972.706.000
b. PNBP	:	Rp.	127.612.839.000
c. BLU	:	Rp.	364.099.686.000
d. PHLN	:	Rp.	-

- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai	:	Rp.	342.042.984.000
b. Belanja Barang	:	Rp.	1.982.974.695.000
c. Belanja Modal	:	Rp.	1.648.667.552.000
- RM	:	Rp.	1.648.667.552.000
- PHLN	:	Rp.	-

Revisi Pagu Anggaran TA. 2015

Pagu TA. 2015 Badan Pengembangan SDM Perhubungan mengalami perubahan/revisi penambahan pagu anggaran akibat adanya:

- a. Penambahan Pagu APBN-P sebesar Rp. 427.900.000.000,-;

- b. Penambahan Pagu BLU sebesar Rp. 67.214.850.000,-;
- c. Penambahan Pagu PNBP sebesar Rp. 64.082.167.000.

Sehingga Total Pagu DIPA BPSDM Perhubungan TA. 2015 setelah adanya penambahan pagu APBN-P, BLU dan PNBP menjadi sebesar **Rp. 4.532.882.248.000,-** dengan rincian sebagai berikut :

- Rincian Persumber dana:
 - a. **RM** : **Rp. 3.909.872.706.000**
 - b. **PNBP** : **Rp. 191.695.006.000**
 - c. **BLU** : **Rp. 431.314.536.000**
 - d. **PHLN** : **Rp. -**

- Alokasi perjenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai : Rp. 348.388.168.000
 - b. Belanja Barang : Rp. 2.172.687.952.000
 - c. Belanja Modal : Rp. 2.011.806.128.000
 - RM : Rp. 2.011.806.128.000
 - PHLN : Rp. -

2. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN T.A 2015

Realisasi penyerapan DIPA T.A 2014 posisi 31 Desember 2015 sebesar **Rp. 3.770.739.390.647,-** dari total PAGU Badan Pengembangan SDM Perhubungan **Rp. 4.532.882.248.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Keuangan = 83,19%
Fisik = 93,49%

Adapun rincian realisasi perjenis belanja adalah

Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Keuangan
Belanja Pegawai	348.388.168.000	280.506.597.242	80,52
Belanja Barang	2.172.687.952.000	1.710.263.001.017	78,68
Belanja Modal	2.011.806.128.000	1.779.969.792.388	88,52

Jenis Belanja	Pagu Dana (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase Keuangan
Total	4.532.882.248.000	3.770.739.390.647	83,19

Masih rendahnya realisasi penyerapan DIPA T.A 2015 Badan Pengembangan SDM Perhubungan dikarenakan:

- Tidak terlaksananya beberapa kegiatan di PKTJ Tegal
 - a. Pembangunan Gedung *Trauma Centre* (Poliklinik), dikarenakan lelang gagal dan tidak ada yang mendaftar lelang;
 - b. Pembangunan Selasar, dikarenakan lelang gagal dan tidak ada yang mendaftar lelang;
 - c. Pembangunan Gudang, , dikarenakan lelang gagal dan tidak ada yang mendaftar lelang.
- Tidak terlaksananya beberapa kegiatan di BP2IP Barombong
 - a. Pengadaan Lanjutan Fire Hydrant, dikarenakan telah dilaksanakan lelang ulang namun tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan;
 - b. Pengadaan Davit, dikarenakan tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaan pekerjaan tidak mencukupi waktunya jika dilakukan lelang ulang;
 - c. Penyusunan AMDAL.
- Tidak terlaksananya beberapa kegiatan di BP2TD Bali
 - a. Penggabungan Sertifikat Tanah, dikarenakan Tanah yang sudah dibebaskan di TA. 2015 sertifikat msh dlm proses, sehingga blm bisa digabung dgn sertifikat tanah tahun sebelumnya;
 - b. Pelaksanaan Diklat Teknis Diklat Pekerti.
- Tidak terlaksananya beberapa kegiatan di PIP Semarang yaitu Penyusunan DED Gedung Asrama B dan C;
- Tidak terlaksananya beberapa kegiatan di STTD Bekasi
 - a. Pengadaan *Smartcity*, dikarenakan jangka waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, karena diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 3 bulan;

- b. Pengadaan Perlengkapan monorel, dikarenakan belum adanya penjelasan terkait barang hibah monorel;
- c. Peralatan Kalibrasi Pengujian Kendaraan Bermotor, dikarenakan lelang gagal dan tidak ada penyedia yang memenuhi persyaratan dan waktu sudah tidak mencukupi lagi;
- d. Pengadaan AC Split 2 PK, dikarenakan lelang gagal 2 kali karena tidak ada penyedia memasukkan penawaran dan penawaran diatas HPS dan waktu sudah tidak mencukupi lagi;
- e. Pengadaan Stasiun Radio Komunikasi (*Repeater*), dikarenakan lelang gagal 3 kali karena tidak ada penyedia memasukkan penawaran dan waktu sudah tidak mencukupi lagi;
- f. Biaya Angkut dan Pemindahan Peralatan Praktek Perkeretaapian, dikarenakan sarana yang akan dihibahkan dalam kondisi rusak.

A. KESIMPULAN

1. Badan Pengembangan SDM Perhubungan telah menetapkan 10 Sasaran Strategis yang berisikan 16 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan rencana tingkat capaian yang ditetapkan.
2. Secara keseluruhan program/kegiatan Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik hal ini diindikasikan dengan tingkat capaian dari kinerja kegiatan maupun sasaran (sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III).
3. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran adalah tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai, alokasi dana sesuai kebutuhan, tersedianya peralatan pendukung serta koordinasi dan kerja sama yang baik di lingkungan Badan Pengembangan SDM Perhubungan melalui pembinaan secara terus-menerus.

B. SARAN

1. Agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lebih berguna untuk umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, format dan isi substansi laporan kinerja perlu dilakukan evaluasi dan penyempurnaan-penyempurnaan.
2. Karena Laporan Kinerja merupakan dokumen yang hidup dan berkesinambungan selama periode waktu Rencana Strategis/Renstra 5 (lima) tahunan, maka untuk Tahun Anggaran 2016 agar dilakukan penyusunan secara lebih komprehensif Rencana Strategis 2015 s/d 2019 untuk Badan Pengembangan SDM berikut Unit Kerja di bawahnya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- Form Renstra Tahun 2015 - 2019
- Form Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015
- Form Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2015
- Form Pengukuran Kinerja Tahun 2015
- Form Perbandingan Pengukuran Kinerja Tahun 2011 sampai dengan 2015
- Form Perbandingan Renstra, RKT, PK dan Capaian Kinerja Tahun 2015

LAMPIRAN A
MATRIK KINERJA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015 - 2019

Instansi : Kementerian Perhubungan

Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan

- IKU : 1. Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan per tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM
2. Jumlah lulusan pendidikan dan pelatihan yang dihasilkan BPSDM setiap tahun yang sesuai dengan standar kompetensi BPSDM

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET				
				2015	2016	2017	2018	2019
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	288.161	300.752	299.672	303.558	303.080
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	266.844	284.305	284.623	289.687	294.779
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	361	385	391	401	413
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	57	62	67	64	65
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (<i>Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum</i>) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	71	72	68	70
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	71	72	68	70
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	141	160	133	139	136
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	2	2	1	0	0
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	76	83	90	94	100
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	86	87	88	89	90
		11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	88	90	92	93	94
		12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	11.681.528.642.759	11.915.159.215.614	12.153.462.399.926	12.396.531.647.925	12.644.462.280.883
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	4	4	4	4	4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET					
				2015	2016	2017	2018	2019	
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	2.664	8.686	2.692	1.996	1.908
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M ²	1.219.522	685.256	455.662	519.448	278.615
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.509	3.899	4.289	4.679	5.069

**FORMULIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Instansi
Unit Eselon I

: Kementerian Perhubungan
: Badan Pengembangan SDM Perhubungan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	288.161	Orang
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	266.844	Orang
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	361	Dokumen
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	57	Sistem
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	76	Dokumen
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	76	Dokumen
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	141	Dokumen
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	2	Lembaga
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	76	Dokumen

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TARGET	
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	86,00	Nilai
		11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	88,00	(%)
		12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	11.681.528.642.759	Rp.
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	4	Peraturan
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	2.664	Unit
		15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	1.219.522	M2
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	3.509	Orang

FORMULIR
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

Instansi
Unit Eselon I
Tahun Anggaran

: Kementerian Perhubungan
: Badan Pengembangan SDM Perhubungar
: 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK AWAL	TARGET PK REVISI
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	269.297	292.693
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	255.870	281.204
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	80	83
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	30	32
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fulfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	82	79
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	24	68
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	81	244
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	12	12
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	35	38
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	86,00	87,00
		11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	89,00	89,25
		12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	9.868.372.564.459	12.951.198.626.401

**FORMULIR
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014**

Instansi
Unit Eselon I
Tahun Anggaran

: **Kementerian Perhubungan**
: Badan Pengembangan SDM Perhubungan
: 2014

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	292.693	463.061	158,21
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	281.204	448.901	159,64
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	83	28	33,73
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	32	22	68,75
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fullfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	79	83	105,06
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.		68	81	119,12
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	244	514	210,66
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	12	7	58,33
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	38	105	276,32
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	87,00	90,46	103,98
		11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	89,25	83,19	93,21

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN
		12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	12.951.198.626.401	13.034.924.807.142	100,65
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	15	35	233,33
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	845	1.113	131,72
		15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	253.144	254.521,22	100,54
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.544	2.568	72,46

PROGRAM

Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

1. Jumlah Anggaran Tahun 2015

2. Pagu Revisi Tahun 2015

3. Jumlah Realisasi Anggaran Th.2015

ANGGARAN

: Rp

: Rp

: Rp

3.973.685.231.000,00

4.532.882.248.000,00

3.770.739.390.647,00

**FORMULIR
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015**

Instansi
Unit Eselon I
Tahun Anggaran

: Kementerian Perhubungan
: Badan Pengembangan SDM Perhubungan
: 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2014				% CAPAIAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	292.693	101.986	198.127	328.161	463.061	158,21
Rata - Rata Capaian Sasaran									158,21
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	281.204	90.768	191.306	317.412	448.901	159,64
Rata - Rata Capaian Sasaran									159,64
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	83	3	7	11	28	33,73
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	32	1	2	5	22	68,75
Rata - Rata Capaian Sasaran									51,24
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fulfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	79	15	45	66	83	105,06
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.		68	15	45	66	81	119,12
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	244	304	304	320	514	210,66
Rata - Rata Capaian Sasaran									144,95
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	12	0	0	0	7	58,33
Rata - Rata Capaian Sasaran									58,33
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	38	19	31	63	105	276,32
Rata - Rata Capaian Sasaran									276,32
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	87,00	0	90	90,46	90,46	103,98
		11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	89,25	4,01	15,76	40,04	83,19	93,21
		12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	12.951.198.626.401	8.467.705.565.227	8.467.705.565.227	8.467.705.565.227	13.034.924.807.142	100,65
Rata - Rata Capaian Sasaran									99,28
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	15	0	8	8	35	233,33
Rata - Rata Capaian Sasaran									233,33
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	845	0	43	438	1.113	131,72
		15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	253.144	0,00	25.486,00	58.846,00	254.521,22	100,54

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET PK	REALISASI CAPAIAN (AKUMULASI) TAHUN 2014				% CAPAIAN
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
Rata - Rata Capaian Sasaran									
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.544	2.157	2.192	2.632	2.568	72,46
Rata - Rata Capaian Sasaran									
72,46									

PROGRAM		ANGGARAN	
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan			
1. Jumlah Anggaran Tahun 2015	: Rp		3.973.685.231.000,00
2. Pagu Revisi Tahun 2015	: Rp		4.532.882.248.000,00
3. Jumlah Realisasi Anggaran Th.2015	: Rp		3.770.739.390.647,00

**FORMULIR
PERBANDINGAN KINERJA TAHUN 2011 s/d 2015**

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2011			2012			2013			2014			2015		
				TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, per tahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	127.736	149.294	116,88	158.305	175.793	111,05	178.821	214.807	120,12	206.652	298.752	144,57	292.693	463.061	158,21
Rata - Rata Capaian Sasaran						116,88			111,05			120,12			144,57			158,21
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/keputusan	Orang	121.476	140.246	115,45	149.216	162.364	108,81	173.821	201.838	116,12	193.010	283.602	146,94	281.204	448.901	159,64
Rata - Rata Capaian Sasaran						115,45			108,81			116,12			146,94			159,64
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	16	15	93,75	94	100	106,38	16	16	100,00	62	62	100,00	83	28	33,73
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	9	9	100,00	17	17	100,00	43	36	83,72	19	18	94,74	32	22	68,75
Rata - Rata Capaian Sasaran						96,88			103,19			91,86			97,37			51,24
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fulfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen				33	30	90,91	15	42	280,00	37	37	100,00	79	83	105,06
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	74	69	93,24	1	1	100,00	7	35	500,00	24	24	100,00	68	81	119,12
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen				229	664	289,96	80	78	97,50	56	49	87,50	244	514	210,66
Rata - Rata Capaian Sasaran						93,24			160,29			292,50			95,83			144,95
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	3	3	100,00	1	0	0,00	2	-	0,00	1	-	0,00	12	7	58,33
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			0,00			0,00			0,00			58,33
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Professionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	3	3	100,00	4	38	950,00	21	27	128,57	41	87	212,20	38	105	276,32
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			950,00			128,57			212,20			276,32
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BWN BPSDM Perhubungan.	10 Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai		77,65	#DIV/0!	89,50	89,50	100,00	94,09	85,19	90,54	85,50	91,75	107,31	87,00	90,46	103,98
		11 Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)		84,78	#DIV/0!	82,17	86,38	105,12	92,00	85,96	93,43	92,00	84,74	92,11	89,25	83,19	93,21
		12 Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	7.620.589.521.610	7.675.583.893.193	100,72	8.814.551.692.643	8.897.224.987.516	100,94	10.163.072.093.749	10.249.341.492.656	100,84	11.125.265.374.056	11.255.938.104.851	101,17	12.951.198.626.401	13.034.924.807.142	100,65
Rata - Rata Capaian Sasaran						#DIV/0!			102,02			94,94			100,20			99,28
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13 Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	22	22	100,00	12	20	166,67	20	21	105,00	10	10	100,00	15	35	233,33
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			166,67			105,00			100,00			233,33
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14 Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	15.135	15.135	100,00	18.241	20.030	109,81	5.919	5.867	99,12	215	208	96,74	845	1.113	131,72
		15 Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	775.964	732.592	94,41	261.062	244.111	93,51	680.060	679.392	99,90	325.969,42	330.281,88	101,32	253.143,70	254.521,22	100,54
Rata - Rata Capaian Sasaran						97,21			101,66			99,51			99,03			116,13
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16 Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	1.848	1.848	100,00	2.905	2.578	88,74	2.518	2.524	100,24	3.072	2.545	82,85	3.544	2.568	72,46
Rata - Rata Capaian Sasaran						100,00			88,74			100,24			82,85			72,46

FORMULIR
PERBANDINGAN RENSTRA, RKT, PK DAN REALISASI

Instansi : Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I : Badan Pengembangan SDM Perhubungan
Tahun Anggaran : 2015

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	RENSTRA	RKT	PK	REALISASI
a	Terwujudnya Peserta Diklat Transportasi Yang Berpotensi Tinggi Yang Didukung Fisik dan Jasmani Yang Prima.	1 Jumlah peserta Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan, pertahun sesuai standar diklat BPSDM Perhubungan.	Orang	288.161	288.161	292.693	463.061
b	Terwujudnya Lulusan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	2 Jumlah lulusan diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan, setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan	Orang	266.844	266.844	281.204	448.901
c	Terwujudnya Sistem dan Metoda Penyelenggaraan Diklat Transportasi Yang Berbasis Teknologi Informasi	3 Jumlah dokumen metode penyelenggaraan Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi informasi.	Dokumen	361	361	83	28
		4 Jumlah sistem informasi yang dibangun.	Sistem	57	57	32	22
d	Terwujudnya Kurikulum dan Silabi Yang Berbasis Kompetensi (Harmonization, Compliance and Demand Fulfillment Curriculum) dan Sesuai Dengan Perkembangan IPTEK.	5 Jumlah kurikulum Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	76	79	83
		6 Jumlah silabi Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	76	76	68	81
		7 Jumlah modul/ bahan ajar Diklat yang berbasis kompetensi Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis kompetensi.	Dokumen	141	141	244	514
e	Terwujudnya Lembaga Diklat Transportasi Yang Mandiri dan Profesional, Transparan dan Akuntabel Yang Diarahkan Untuk Menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	8 Jumlah lembaga diklat Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian yang menjadi Badan Layanan Umum (BLU).	Lembaga	2	2	12	7
f	Terwujudnya Kerjasama dan Kemitraan Yang Baik Dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian dan Profesionalisme Lembaga, International Recognition Serta Public Private Partnership.	9 Jumlah dokumen kerjasama dengan lembaga pemerintah/ swasta nasional atau asing di bidang Diklat Transportasi	Dokumen	76	76	38	105

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	RENSTRA	RKT	PK	REALISASI	
g	Meningkatnya Optimalisasi Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja, Anggaran, dan BMN BPSDM Perhubungan.	10	Nilai AKIP BPSDM Perhubungan.	Nilai	86	86,00	87	90,46
		11	Tingkat Penyerapan Anggaran BPSDM Perhubungan.	(%)	88	88,00	89	83,19
		12	Nilai aset BPSDM Perhubungan yang berhasil diinventarisasi.	Rp.	11.681.528.642.759	11.681.528.642.759	12.951.198.626.401	13.034.924.807.142
h	Terwujudnya Peraturan Perundangan dan Ketentuan Pelaksanaan Lainnya di Bidang SDM Transportasi Yang Memenuhi Ketentuan Nasional dan/atau Internasional.	13	Jumlah draft peraturan perundangan dan ketentuan pelaksanaan lainnya di Bidang SDM Transportasi yang dihasilkan.	Peraturan	4	4	15	35
i	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Diklat Transportasi Berbasis Teknologi Tinggi/ Mutakhir Yang Memenuhi Standar Nasional dan/atau Internasional.	14	Jumlah sarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan yang berbasis teknologi tinggi/ mutakhir.	Unit	2.664	2.664	845	1.113
		15	Jumlah prasarana Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur Perhubungan.	M2	1.219.522	1.219.522	253.144	254.521,22
j	Tersedianya Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi Yang Prima, Profesional dan Beretika.	16	Jumlah tenaga kependidikan Diklat Transportasi di Lingkungan BPSDM Perhubungan yang prima, profesional dan beretika.	Orang	3.509	3.509	3.544	2.568